

Laporan Akhir
HIBAH BERSAING

PEMETAAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK TENAGA PENDIDIK DAN
KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KOTA BANJARMASIN



Peneliti Utama:
Nasruddin, S.Pd., M.Sc.

Anggota:

1. Syaharuddin, S.Pd., MA.
2. Donny Stiadi, S.Si., M.Si.
3. Muhammad Ziyad, SE., MM.

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2011

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Judul Kegiatan : Pemetaan Standar Kualifikasi Akademik Jenjang Pendidikan Dasar & Menengah Di Banjarmasin

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 724 / Pendidikan Geografi

Ketua Peneliti
A. Nama Lengkap : NASRUDDIN S.Pd, M.Sc
B. NIDN : 0001077904
C. Jabatan Fungsional : Lektor
D. Program Studi : Pendidikan Geografi
E. Nomor HP : 081348133117
F. Surel (e-mail) : nasruddin_luthfie@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)
A. Nama Lengkap : SYAHARUDDIN S.Pd, MA
B. NIDN : 0001037404
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Anggota Peneliti (2)
A. Nama Lengkap : DONI STIADI S.Si, M.Si
B. NIDN : 0013077607
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

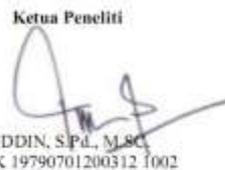
Anggota Peneliti (3)
A. Nama Lengkap : MUHAMMAD ZIYAD SE, MM
B. NIDN : 0001067707
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun
Penelitian Tahun ke : 1
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 98.800.000,00
Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke DIKTI Rp34.000.000,00
- dana internal PT Rp-
- dana institusi lain Rp-
- inkind sebutkan Rp-

Banjarmasin, 28 -11-2011

Mengetahui
Dekan Fkip

Dr. H. Mubandahyan, MA
NIP/NIK 39511101977031003

Ketua Peneliti

NASRUDDIN, S.Pd, M.Sc
NIP/NIK 19790701200312 1002


Dr. Ahmad Zain Rashedi, SE, M.Si
NIP/NIK 198711121995121002

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul : Pemetaan Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin

2. Ketua Peneliti

- a. Nama lengkap : Nasruddin, S.Pd., M.Sc.
- b. Bidang keahlian : Pendidikan Geografi
- c. Jabatan Struktural : Penata/ III. c
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Unit kerja : FKIP Universitas Lambung Mangkurat
- f. Alamat surat : Jalan Brigjend H. Hassan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin
- g. Telpon/Faks : 0511-3304914
- h. E-mail : nasruddin_luthfie@yahoo.co.id

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi	Curahan Waktu (jam/minggu)
1	Syahrudin, S.Pd., MA.	Pendidikan Sejarah	Universitas Lambung Mangkurat	10
2	Donny Stiadi, S.Si., M.Si.	Ekonomi Manajemen	Universitas Lambung Mangkurat	10
3	Muhammad Ziyad, SE. MM.	Ekonomi Manajemen	Universitas Lambung Mangkurat	10

4. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Obyek Penelitian dilaksanakan pada tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin

5. Masa pelaksanaan penelitian:

- Mulai : Januari 2011
- Berakhir : Agustus 2011

6. Anggaran yang diusulkan:

- Tahun pertama : Rp 34.400.000,-
- Anggaran keseluruhan : Rp 34.400.000,-

7. Lokasi Penelitian: Kota Banjarmasin

8. Hasil yang ditargetkan:

Penelitian ini akan menghasilkan suatu karya tulis yang bermanfaat bagi peningkatan pendidikan berupa buku profil kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan

9. Institusi lain yang terlibat : tidak ada

10. Keterangan lain yang dianggap perlu : tidak ada

ABSTRAK

Penelitian pemetaan standar kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Banjarmasin, didasarkan pada permasalahan bahwa keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Depdiknas, 2007). Tujuan penelitian mengetahui profil, kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan serta mengkaji langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan standar tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin.

Tujuan kegiatan dalam pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: (1) mengetahui profil standar tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin; (2) mengkaji standar kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin dan (3) mengkaji langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan standar tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin?

Metode penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan strategis, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data; dan (3) penyajian hasil analisis data (pelaporan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yang merupakan suatu metode dalam mengkaji objek penelitian melalui observasi di lapangan. Analisis penelitian dilaksanakan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Kata Kunci: Pemetaan, Standar, Kualifikasi Akademik, Tenaga Pendidik, Kependidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara nasional, tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar Pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warga Negara (www.kalselprov.go.id, 2009). Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Depdiknas, 2007).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dengan tegas menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan komponen utama dalam pengembangan pendidikan yang sangat membutuhkan jumlah anggaran yang memadai yang terkait didalamnya dengan kompetensi guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar pada berbagai tingkatan pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut di atas sangat tergantung dari standar tenaga pendidik dan kependidikan.

Pentingnya dilaksanakan pengkajian mengenai pemetaan mutu tenaga pendidik dan kependidikan diharapkan dapat merepresentasikan pada percepatan peningkatan mutu pendidikan secara umum di Kota Banjarmasin, sehingga akan tergambar kebijakan (program dan strategi) yang representatif dan variatif, maka perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh tentang mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Banjarmasin.

1.2. Tujuan Khusus

Tujuan kegiatan dalam pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profil standar tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin?
2. Mengkaji standar kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin?
3. Mengkaji langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan standar tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Banjarmasin?

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Keluaran dokumen Pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bermanfaat sebagai masukan dalam rangka perbaikan mutu tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin, meliputi:

1. Sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam membina dan memperbaiki tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin;
2. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap standar tenaga pendidik dan kependidikan, sebagai dasar penentuan prioritas program unggulan pendidikan di Kota Banjarmasin;
3. Sebagai acuan oleh pemerintah daerah guna mempercepat pengembangan standar tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan di Kota Banjarmasin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Masalah Kualitas Pendidikan Indonesia

Masalah kualitas Pendidikan di Indonesia belum menggembirakan. Hal itu dibuktikan dengan adanya angka kuantitatif tentang penduduk Indonesia yang tidak/belum tamat SD 63.855.491 (35,29 %), penduduk tamat SD 61.917.997 (34,22 %); tamat SMP 24.545.352 (13,57%); tamat SMA 25.302.149 (13,98 %), adapun yang lulus program diploma 1,32 persen dan lulus S-1 (1,80 %). Lemahnya angka partisipasi sekolah ini diperparah kualitas pendidikan (tinggi) yang ikut melorot, dalam Top 400 Universities: *World Universities Rankings* 2007, perguruan tinggi terkemuka Indonesia ada di urutan bawah. Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-360 (tahun 2006 urutan ke-270), Institut Teknologi Bandung peringkat ke-369 (tahun 2006 urutan ke-258), dan Universitas Indonesia peringkat ke-395 (tahun 2006 urutan ke-250). Rendahnya angka partisipasi maupun kualitas membuat indeks pendidikan Indonesia turun peringkat. Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menempatkan pendidikan Indonesia turun dari peringkat ke-58 menjadi ke-62 dari 130 negara. Malaysia di peringkat ke-56 dan Brunei Darussalam di peringkat ke-43 (Harian Kompas 18 Desember 2007, dalam Harefa, 2008).

Rendahnya pembangunan pendidikan Indonesia jelas memengaruhi kualitas manusia Indonesia. Hal ini sering dijadikan pegangan untuk melihat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia amat rendah (lihat Tabel 1 tentang HDI Indonesia dan beberapa Negara lainnya), padahal pengukuran HDI didasarkan tiga indikator: panjang usia; pendidikan, dan angka harapan hidup. Laporan UNDP 2007/2008 (dalam Harefa, 2008) menyebutkan, pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan kemajuan. Umur harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan kematian ibu menurun, namun, berbagai keberhasilan itu dikhawatirkan akan mengalami guncangan karena penurunan anggaran pembangunan kesehatan dan pendidikan, serta mundurnya pelaksanaan program keluarga berencana akibat desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi kualitas manusia seperti itu, tidak usah heran apabila kita kalah bersaing dengan bangsa lain, bahkan, tidak usah heran apabila kita tidak pernah bisa memanfaatkan kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki dan pada akhirnya memang kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa besar sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki.

Tabel 1. Perkembangan Peringkat HDI Beberapa Negara Tahun 1975-2005

Negara	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Indonesia	71	83	85	93	91	85	107
Malaysia	50	61	58	61	54	50	63
Singapura	33	40	37	31	27	-	25
Thailand	52	65	66	69	61	63	77
Vietnam	-	-	82	94	90	81	105
India	80	94	96	104	104	102	128
China	60	78	81	89	84	76	82
Brazil	46	54	54	62	57	51	70
Total Negara	101	116	125	138	144	141	177

Sumber : Litbang Harian Kompas, Kristanto, 2007 dalam Harefa, 2008

Rasio Anggaran Pendidikan terhadap PDB di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terendah kedua dalam hal rasio anggaran pendidikan terhadap PDB, yakni anggaran pendidikan kita masih di bawah 2 persen dari PDB, sementara Malaysia mendekati 10 persen. Rasio terhadap belanja APBN kita di bawah 10 persen, sementara Malaysia di atas 20 persen, lebih dari 80 persen anggaran pendidikan kita habis untuk gaji guru, sementara di Malaysia hanya sekitar 50 persen, semua negara yang maju dalam hal ekonomi adalah negara-negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunannya.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Pendidikan di Beberapa Negara Asia

Negara	Rasio Terhadap PDB (%)	Rasio Terhadap APBN (%)
Indonesia	1,4	9
Malaysia	5,2	23
Vietnam	2,3	-
Philipina	3,4	20
Thailand	5,0	22
Korea Selatan	5,3	-
Jepang	7,0	-
Singapura	-	19

Sumber: Berbagai Publikasi, 2006 (dalam Harefa, 2008)

Banyak masalah mutu atau kualitas yang dihadapi oleh dunia pendidikan, seperti: mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Masalah mutu tersebut terkait dengan mana manajerial para pemimpin pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-

komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan (Sukmadinata, 2006: 8).

Berdasarkan keterangan di atas, maka salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yakni kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Dengan terpenuhinya standar kualifikasi akademik tersebut maka upaya meningkatkan mutu lulusan (*out put*) dapat terealisasi.

2.1.2. Pemetaan Pendidikan

Pemetaan sangat berkaitan dengan masalah perencanaan pendidikan. Memetakan pendidikan berarti sebuah upaya melihat kondisi pendidikan disuatu tempat dengan memperhatikan sebarannya, lalu kemudian ia dipetakan sehingga tampak dengan jelas kondisi pendidikan pada daerah tertentu. Karena itu, memetakan adalah bagian dari upaya merencanakan pendidikan itu sendiri. Pemetaan pendidikan merupakan sesuatu yang penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pendidikan masyarakat, oleh karena itu, pemetaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan untuk melihat standar minimal yang dimiliki oleh sekolah pada suatu daerah (Bedjo, dkk., 2010).

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005).

2.1.3. Tenaga Pendidik

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1).

Pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis,

terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi (Miarso, 1994 dalam <http://www.dhanay.co.cc>).

Pendidik (guru) yang akan berhadapan langsung dengan para peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena pendidik akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran), karena itu pula, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar (<http://www.dhanay.co.cc> diakses pada Tanggal 3 Maret 2011).

2.1.4. Peran Tenaga Pendidik

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2).

Peran seorang pendidik sangat besar sekali. Dimana keyakinan seorang pendidik atau pengajar akan potensi manusia dan kemampuan semua peserta didik untuk belajar dan berprestasi merupakan suatu hal yang penting diperhatikan. Aspek-aspek teladan mental pendidik atau pengajar berdampak besar terhadap iklim belajar dan pemikiran peserta didik yang diciptakan pengajar. Pengajar harus mampu memahami bahwa perasaan dan sikap peserta didik akan terlihat dan berpengaruh kuat pada proses belajarnya (Bobbi DePorter, 2001 dalam Sopian, 2007).

Proses pendidikan merupakan totalitas ada bersama pendidik bersama-sama dengan anak didik; juga berwujud totalitas pengarahan menuju ke tujuan pendidikan tertentu, disamping orde normatif guna mengukur kebaikan dan kemanfaatan produk perbuatan mendidik itu sendiri. Maka perbuatan mendidik dan membentuk manusia muda itu amat sukar, tidak boleh dilakukan dengan sembrono atau sambil lalu, tetapi benar-benar harus dilandasi rasa tanggung jawab tinggi dan upaya

penuh kearifan. Unsur tanggung jawab moral serta pertimbangan rasional, dan perbuatan mendidiknya dilakukan tanpa refleksi yang arif, berlangsung serampangan asal berbuat saja, dan tidak disadari benar, maka pendidik yang melakukan perbuatan sedemikian adalah orang lalai, tipis moralnya, dan bisa berbahaya secara sosial, karena itu konsepsi pendidikan yang ditentukan oleh akal budi manusia itu sifatnya juga harus etis. Tanpa pertanggungjawaban etis ini perbuatan tersebut akan membuahkan kesewenangwenangan terhadap anak-didiknya.

Peran seorang pengajar atau pendidik selain mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada anak didik juga bertugas melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 39 Ayat 2. Di samping itu suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggung jawab, bahwa di dalam melaksanakan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan peserta didik, di mana selain peran yang telah disebutkan di atas, hal yang perlu dan penting dimiliki oleh pendidik yaitu pendidik harus mengetahui psikologis mengenai peserta didik.

Proses pendidikan dalam persoalan psikologis yang relevan pada hakikatnya inti persoalan psikologis terletak pada peserta didik, sebab pendidikan adalah perlakuan pendidik terhadap peserta didik dan secara psikologis perlakuan pendidik tersebut harus selaras mungkin dengan keadaan peserta didik (Suryabrata, 2004 dalam Sopian, 2007).

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama, karena Proses belajar-mengajar mengandung serangkaian perbuatan pendidik atau guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar-mengajar ini memiliki arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif, dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar (Sopian, 2007 : 15).

2.1.5. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1). Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan

pendidikan selain tenaga pendidik (<http://www.kemdiknas.go.id/peserta-didik.aspx>, diakses pada Tanggal 3 Maret 2011).

Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, satpam dan tenaga kebersihan (Panduan P2M Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2008). Tenaga kependidikan memiliki lingkup profesi yang lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya tenaga pendidik, pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar, kepala sekolah adalah diantara kelompok profesi yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan (<http://www.dhanay.co.cc> diakses pada Tanggal 3 Maret 2011). Fungsi tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1).

2.1.6. Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

2.1.6.1. Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 1).

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 2). Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional dan Kompetensi sosial (Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3).

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi (Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2007, pasal 29, ayat 4, (dalam <http://www.bintangbangsaku.com/>) pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan, (Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 30 Ayat 4). Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan (Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 30 Ayat 5).

2.1.6.2. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 menyebutkan bahwa standar kualifikasi Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB adalah berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun, serta memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertifikat yang relevan. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.

Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar. Penjaga Sekolah/Madrasah Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. Tukang Kebun berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m². Tenaga Kebersihan berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat. Pengemudi berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki kendaraan roda empat. Pesuruh Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi

perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008).

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui Jalur Pendidik harus memenuhi syarat berkualifikasi serendah-rendahnya Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Ayat 1).

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat berkualifikasi Diploma Dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun atau berkualifikasi Diploma Dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah. Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008).

2.2. Kajian Empiris

Pemetaan mutu pendidikan juga telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota di Indonesia, di antaranya, Kota Banjarbaru, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Kediri. Di Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan dua pemetaan, yakni pemetaan sarana/prasarana dan pemetaan kinerja guru. Dua pemetaan itu sangat bermanfaat bagi pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya Dinas Pendidikannya untuk membuat kebijakan strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ke depan (Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, 2008). Perbedaan yang mendasar pada penelitian di Kota Banjarmasin yakni berupaya memberikan informasi mengenai sebaran keruangan tenaga pendidik dan kependidikan Kota Banjarmasin yang berimplikasi terhadap daerah atau desa tertinggal. Hasilnya diharapkan pemerintah dapat mengupayakan langkah-langkah strategis pada percepatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan tidak hanya di kota tapi juga di desa, sehingga mutu pendidikan bagi desa tertinggal yang notabene sebagian besar adalah golongan menengah ke bawah dapat berdaya saing dengan pendidikan di wilayah perkotaan yang relatif lebih maju.

Pemetaan pendidikan juga telah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta. Penelitian itu telah menjelaskan beberapa hal di antaranya uraian tentang kondisi pendidikan dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kidul. Penelitian tersebut berusaha

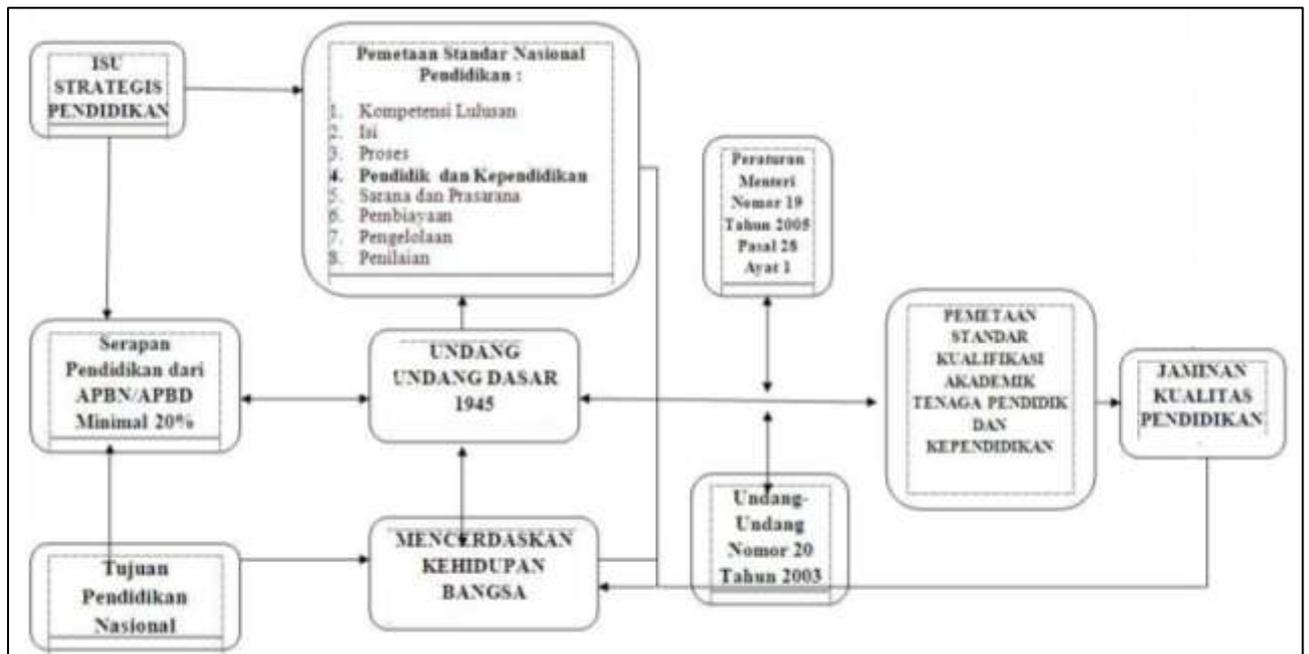
menggambarkan bagaimana sebaran pendidikan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya persoalan sebaran guru dan siswa serta sarana fisik pendukung berupa perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan laboratorium serta ruang kelas (Sugeng Andono, 2008). Penelitian itu memang telah berupaya memetakan beberapa hal di atas, namun bagaimana pemetaan pendidikan mampu “mendongkrak” partisipasi masyarakat desa tertinggal (miskin) untuk bersekolah tampaknya belum dilakukan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Kediri ialah bahwa terdapat disparitas jumlah sarana sekolah menengah yang ada di masing-masing kecamatan dengan sebaran penduduk yang merata di setiap kecamatan (Kecamatan Mojoroto 87.768 jiwa, Kecamatan Kota 76.638 jiwa, Kecamatan Pesantren 71.766 jiwa) tidak diimbangi dengan jumlah sarana sekolah menengah yang ada (Kecamatan Mojoroto 24 sekolah, Kecamatan Kota 22 sekolah, Kecamatan Pesantren 2 sekolah) (<http://www.theplanner.wordpress.com>).

Pendidikan di Indonesia terdapat kecenderungan mengabaikan pendidikan di daerah terpencil yang taraf kehidupan masyarakat tergolong miskin. Karena itu, buku-buku yang berjudul “Orang Miskin Dilarang Sekolah”, film dan novel “Laskar Pelangi” tidak akan pernah muncul jika kondisi pendidikan di Indonesia tidak memiliki masalah yang cukup serius. Hal itu juga memberikan gambaran bahwa ada relevansi antara kemampuan akses pendidikan dengan kemiskinan. Sebagai gambaran, bahwa sejak tahun 1970 penduduk miskin berjumlah 67,9 juta (58,9 %). Tahun 1996 turun menjadi 34,5 %. Ketika negeri ini dilanda krisis tahun 1998 meningkat lagi menjadi 49,5 %. Tahun 1999 kembali turun menjadi 23,4%. Tahun 2004 terjadi lagi peningkatan sebanyak 36,2 %. Persentase kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan di desa lebih banyak penduduk miskin dengan komposisi 24,8 juta (20,1 %) dan 11,4 juta (12,1 %) (Erlis Karnesih, 2005). Kenyataan ini mengharuskan kita untuk lebih memprioritaskan pendidikan di kawasan desa terpencil agar akses pendidikan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan selain yang telah disebutkan di atas, juga meliputi kompetensi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang secara langsung menunjang dalam proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar (E.Mulyasa, 2003:49). Memetakan tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya di Kota Banjarmasin akan mampu memberikan gambaran sejauhmana realitas gambaran mutu tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Upaya ini sangat berkaitan dengan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan, khususnya masyarakat daerah terpencil di Kota Banjarmasin .

Pemetaan ini tentu penting artinya dan menjadi bahan acuan bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk membenahi pendidikan di daerahnya agar berupaya mempercepat mutu pendidikan khususnya ditemukannya langkah-langkah strategis mengenai mutu tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai standar nasional yang sejalan dengan desentralisasi pendidikan itu sendiri.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan strategis, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data; dan (3) penyajian hasil analisis data (pelaporan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yang merupakan suatu metode dalam mengkaji objek penelitian melalui observasi di lapangan. Analisis penelitian dilaksanakan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

3.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan (bulan Januari hingga bulan Juni 2011).

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh daerah seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seluruh satuan pendidikan yakni 752 yang terdiri dari TK/TK S, SD/SDS, SMPN/SMPS, SMK/SMAS, SMK/SMKS. Selanjutnya diambil sampel Penelitian dengan cara *Stratified Proportional Random Sampling*, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian di Kota Banjarmasin

Satuan Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Sampel
TK NEGERI	2	51	5
TK SWASTA	223	993	99
<i>Sub Total</i>	225	1044	
SDN	230	2681	268
SD SWASTA	31	491	49
<i>Sub Total</i>	261	3172	
SMPN	34	1207	121
SMPS	24	428	43
<i>Sub Total</i>	58	1635	
SMAN	13	579	58
SMAS	17	471	47
<i>Sub Total</i>	30	1050	
SMKN	5	329	33
SMKS	10	294	29
<i>Sub Total</i>	15	623	
TOTAL	589	7524	752

(BPS Kota Banjarmasin, 2009 (diolah))

b. Variabel Penelitian

Variabel adalah pengelompokan yang logis dari dua atau lebih atribut, selanjutnya Mantra (2004) menjelaskan variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian. Variabel dalam penelitian ini yakni variabel kualifikasi akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Jabaran dan Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator/Kriteria	Tolok Ukur	Pengumpulan Data
1	Tenaga Pendidik	Kualifikasi Akademik (PAUD), SD, SMP SMA/SMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik pendidikan minimum 2. Latar Belakang Pendidikan 3. Kepemilikan Sertifikat Profesi 	Survey
2	Tenaga Kependidikan	TK	Minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala TK/RA 2. Tenaga kebersihan sekolah 	Survey
		SD	Minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekolah 2. Tenaga Administrasi 3. Tenaga Perpustakaan 4. Tenaga Kebersihan sekolah 	Survey
		SMP dan SMA	Minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekolah 2. Tenaga Administrasi 3. Tenaga Perpustakaan 4. Tenaga Laboratorium 5. Tenaga Kebersihan sekolah 	Survey
		SMK/MAK	Minimal terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekolah 2. Tenaga administrasi 3. Tenaga perpustakaan 4. Tenaga laboratorium 5. Tenaga kebersihan sekolah 	Survey

3.5. Pengumpulan Sumber Data

Pengumpulan sumber data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait dan kantor-kantor statistik di Kota Banjarmasin. Data primer diperoleh dari sumber primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari para responden.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dari data primer dikumpulkan menggunakan kombinasi teknik-teknik pengumpulan sebagai berikut: Daftar pertanyaan berupa kuesioner yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari responden penelitian.

- 1) Interview Mendalam, berupa wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan para responden dalam penelitian ini.
- 2) Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan.

3.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan standar kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Akademik Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Geografis Kota Banjarmasin

4.1.1. Lokasi

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Kota Banjarmasin dibelah oleh sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 72 km² ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah saat sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, pemukiman adalah 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan penambahan kepadatan penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
- Selatan : Kabupaten Banjar (kecamatan Tatah Makmur)
- Barat : Sungai Barito (seberangnya kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
- Timur : Kabupaten Banjar (kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar)

Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan dengan masing-masing luas wilayah kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5. Luas Wilayah Kota Banjarmasin menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)	%
1	Banjarmasin Barat	13.37	18.57
2	Banjarmasin Selatan	20.18	28.03
3	Banjarmasin Tengah	11.66	16.19
4	Banjarmasin Timur	11.54	16.03
5	Banjarmasin Utara	15.25	21.18
	TOTAL	72.00	100.00

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa luas wilayah Kota Banjarmasin yakni 72 km², dengan luas wilayah tertinggi yakni di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan yakni 20,18 km² (28,03%) dan terendah di Kecamatan Banjarmasin Tengah yakni 11,54 km² (16,03%). Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan sentral atau pusat-pusat pelayanan di Kota Banjarmasin meliputi perdagangan, pemerintahan atau dengan kata lain sebagai simpul jasa, meskipun wilayah kecamatan lainnya memiliki fungsi yang sama namun frekuensi yang relatif lebih rendah.

4.1.2. Topografi

Wilayah Kota Banjarmasin secara topografi terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut atau merupakan daerah dataran yang terdiri dari rawa-rawa atau sering disebut sebagai daerah dataran banjir dengan luas wilayah 72 km². Oleh karena itu, Kota Banjarmasin memiliki suhu udara yang panas dengan suhu rata-rata 25 – 38 ° C dengan curah hujan bulanan rata-rata sekitar 236 mm dan jumlah hari hujan berkisar 157 hari per tahun. (“Profil dan Potensi Wilayah Kota Banjarmasin”, <http://eissartika.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2011).

4.1.3. Penggunaan Lahan

Tanah aluvial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metaforf yang bagian permukaan ditutupi oleh kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa. Penggunaan tanah di Kota Banjarmasin Tahun 2003 untuk lahan pertanian seluas 2.962,6 Ha, Industri 278,6 Ha, Perusahaan 337,3 Ha, Jasa 486,4 Ha dan Tanah Perumahan 3.135,1 Ha. Dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya lahan pertanian cenderung menurun, sementara untuk lahan perumahan mengalami perluasan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Luas optimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebuah kota adalah 30% dari luas kota, dimana Banjarmasin hanya memiliki 10 sampai 12 % RTH saja.

- Pertanian : 3,390,5 Ha (47,09%)
- Industri : 148,9 Ha (3,52%)
- Perkantoran : 298,4 Ha (4,14%)
- Perdagangan dan Jasa: 407,9 Ha (5,66%)
- Perumahan : 2.305 Ha (39,59%)

4.1.4. Kondisi Sosiokultural Masyarakat

Pada bagian ini akan diuraikan keadaan sosio-kultural masyarakat Kota Banjarmasin. Beberapa hal penting yang akan diuraikan yakni berkenaan dengan keadaan pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana, dan kehidupan agama.

4.1.4.1. Keadaan Pendidikan

Faktor yang sangat berperan dalam pencapaian pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan penduduknya pada suatu wilayah maka akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupannya. Guna mencapai pendidikan yang diharapkan diperlukan sarana dan prasarana serta unsur penunjang lainnya dalam proses pendidikan.

Agar lebih jelas, berikut akan diuraikan keadaan pendidikan Kota Banjarmasin, khususnya yang berkaitan keadaan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Juga akan diuraikan APK dan APM. Jumlah guru TK baik negeri maupun swasta yakni sejak tahun 2007 sampai 2009 adalah sbb:

Tabel 6. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru TK Negeri dan Swasta Kota Banjarmasin

Tahun	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2006/2007	1	219	16	916
2007/2008	2	224	15	932
2008/2009	2	223	51	993
2009/2010	2	238	54	1232
Jumlah	7	904	136	4073

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Pada Tabel 6 tergambar bahwa terjadi pertumbuhan sekolah Taman Kanak-kanak sejak tahun ajaran 2006/2007 sampai 2009/2010. Mungkin pertumbuhan jumlah sekolah tidak begitu signifikan, namun penambahan jumlah guru mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yakni tahun 2006/2007 berjumlah 16 orang (negeri), 916 orang (swasta), 2007/2008 berjumlah 15 orang (negeri), 932 orang (swasta) 2008/2009 berjumlah 51 orang (negeri), 993 orang (swasta) dan tahun 2009/2010 bertambah lagi menjadi 54 orang (negeri), 1232 orang (swasta). Data ini belum termasuk data akhir 2011, ada kemungkinan bertambah lagi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pertumbuhan sekolah TK di Kota Banjarmasin dapat disimpulkan mengalami kenaikan secara signifikan. Tentu gambaran ini dapat dipahami bahwa pertumbuhan pendidikan TK di Kota Banjarmasin cukup kondusif dan berpotensi untuk terus dikembangkan.

Indikasi ini juga dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan TK cukup baik, yang mana sebelumnya TK tidak begitu mendapat perhatian dari masyarakat luas. Hal ini diduga karena sebelumnya, tidak ada persyaratan kewajiban memiliki ijazah TK bagi sekolah-sekolah SD favorit.

Pertumbuhan jumlah TK ternyata juga diikuti pertumbuhan jumlah TPA (Taman Pendidikan Alquran), KB (Kelompok Belajar) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yaitu, TPA berjumlah 18 sekolah, KB 71 sekolah, dan PAUD berjumlah 7. (BPS, 2010: 84). Pada perkembangan tingkat SD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru SD Negeri dan Swasta Kota Banjarmasin

Tahun	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri (tetap dan tidak tetap)	Swasta
2006/2007	249	30	1229	469
2007/2008	279	32	1169	493
2008/2009	230	31	1207	491
2009/2010	205	33	1191	550
Jumlah	963	126	4796	2003

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Pada tabel 7 dapat dijelaskan bahwa baik sekolah dan guru swasta dan negeri mengalami fluktuasi perkembangan sejak tahun 2006/2007-2009/2010, dengan rincian sbb: dari periode tahun 2006/2007 – 2007/2008 mengalami peningkatan sekolah (baik negeri maupun swasta) dan guru (negeri dan swasta), namun dari tahun 2008/2009 – 2009/2010 pada sekolah negeri mengalami penurunan dari 230 turun menjadi 205, namun sekolah swasta justru bertambah dari 31-33 sekolah. Sedangkan jumlah guru negeri juga mengalami penurunan dari periode 2006/2007-2007/2008 dari 1229 menjadi 1169, kemudian periode berikutnya naik lagi dan periode berikutnya turun lagi. Begitu pula pada guru swasta, namun hanya periode 2007/2008 – 2008/2009 yang mengalami penurunan jumlah guru, dan pada periode 2009/2010 mengalami kenaikan lagi.

Fluktuasi jumlah perkembangan sekolah ini sangat dimungkinkan terjadi penutupan sekolah karena kekurangan murid. Sedangkan fluktuasi jumlah guru karena tidak seimbang rasio antara jumlah guru yang memasuki usia pensiun dan penerimaan jumlah CPNS atau GTT (honorar).

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru (tetap dan tidak tetap) SMP Negeri dan Swasta Kota Banjarmasin

Tahun	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2006/2007	34	23	1229	436
2007/2008	34	25	1169	414
2008/2009	34	24	1207	428
2009/2010	34	24	1191	410
Jumlah	136	96	4796	1688

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 tergambar, bahwa jumlah sekolah negeri tidak mengalami penambahan selama empat periode, sedangkan sekolah swasta bertambah pada periode 2007/2008 walaupun pada periode berikutnya mengalami penurunan. Sedangkan pada jumlah guru negeri dan swasta mengalami fluktuasi. Fluktuasi jumlah guru pada dasarnya sama dengan penjelasan pada jenjang SD, yakni tidak seimbang rasio jumlah PNS yang memasuki dunia pensiun dan penerimaan CPNS atau GTT (honorar).

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru (tetap dan tidak tetap) SMA Negeri dan Swasta Kota Banjarmasin

Tahun	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2006/2007	13	16	678	454
2007/2008	13	23	548	453
2008/2009	13	17	579	471
2009/2010	13	17	569	463
Jumlah	52	73	2374	1841

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan jumlah sekolah negeri sejak periode awal sampai akhir tidak mengalami penambahan. Sedangkan pada sekolah swasta mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode 2007/2008, dan mengalami penurunan yang drastis pada periode berikutnya.

Jumlah guru negeri dan swasta juga mengalami fluktuasi sejak periode awal sampai akhir, dan penyebabnya dapat diperkirakan sebagaimana yang terjadi pada jenjang SD dan SMP, yakni tidak seimbang rasio jumlah guru yang memasuki usia pensiun dan jumlah CPNS atau GTT (honorar).

Tabel 10. Perkembangan Jumlah Sekolah dan Guru (tetap dan tidak tetap) SMK Negeri dan Swasta Kota Banjarmasin

Tahun	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2006/2007	112	9	323	249
2007/2008	119	10	316	302
2008/2009	139	10	329	293
2009/2010	146	12	335	350
Jumlah	516	41	1303	1194

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 10 maka dapat dijelaskan bahwa jumlah sekolah negeri mengalami peningkatan pada periode kedua sampai periode akhir, sedangkan sekolah swasta meningkat pada periode kedua dan keempat. Peningkatan jumlah ini tentu pertumbuhan yang wajar dari periode ke periode. Sedangkan jumlah guru mengalami fluktuasi yang sangat dimungkinkan karena persoalan tidak seimbang rasio jumlah pensiun dan penerimaan CPNS atau GTT (honorar).

4.1.4.2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan serta merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada tahun 2009 terdapat 10 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit bersalin. Sarana pusat kesehatan lainnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 26 unit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu 32 unit. (BPS, 2010: 80).

Pemanfaatan sarana kesehatan secara maksimal diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banjarmasin. Banyaknya jumlah sarana kesehatan tentu dapat dijadikan sebagai indikator sebagai peluang untuk memperoleh kehidupan masyarakat yang lebih sehat, dan kesehatan itu adalah sebuah investasi untuk meningkatkan taraf hidup yang lain.

4.1.4.3 Keluarga Berencana

Tujuan Keluarga Berencana (KB) antara lain tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran. Selama tahun 2009 berdasarkan penggunaan alat kontrasepsi, maka lebih dari 91,52% pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB menggunakan pil dan suntik. Jumlah keluarga prasejahtera tahun 2009 mengalami penurunan, dari 10.054 keluarga pada tahun 2008 menjadi 9.635 keluarga pada Tahun 2009 (BPS, 2010: 81).

Perencanaan keluarga penting disosialisasikan mengingat Kota Banjarmasin merupakan ibukota provinsi yang akan mengalami masalah jika penduduk tidak dibatasi. Hal ini juga tentu berdampak terhadap pendidikan, yakni tidak terlayani masyarakat dengan baik karena banyaknya jumlah persaingan memasuki sekolah.

4.1.4.4 Kehidupan Agama

Masyarakat Kota Banjarmasin dikenal bersifat agamis, khususnya agama Islam. Guna mengarahkan kehidupan beragama utamanya dalam memupuk keimanan umat, telah dibangun tempat-tempat ibadah yang dianut penduduk oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat-tempat ibadah tersebut pada umumnya tidak hanya digunakan untuk ibadah sholat wajib tapi juga digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti peringatan hari-hari besar Islam, sebagai tempat melaksanakan kegiatan ceramah rutin dari seorang “Tuan Guru”, tempat berlangsungnya baca tulis Alquran (TK/TPA) bagi yang memiliki gedung sendiri.

4.1.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 11. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Banjarmasin

Tahun	Laki (L)	Perempuan (P)	L+P	Pt *) (%)	Kp *) (jiwa/Km ²)
2009	327.790	311.112	638.902	0	0
2007	313.272	302.298	615.570	2	0
2006	300.582	302.143	602.725	0	0
2004	278.952	293.348	572.300	0	7,875
2003	283.247	282.761	566.008	0	7,949

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010

Catatan: *) Pt= Pertumbuhan penduduk (%), Kp= Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)

Tabel 11 menggambarkan bahwa telah terjadi pertumbuhan penduduk laki-laki pada Tahun 2006, 2007 dan 2009, begitu pula perempuan, bahkan penambahan jumlah telah terjadi sejak tahun 2003. Namun secara persentase hanya tahun 2007 saja yang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan, yakni sebanyak 2 %.

Jumlah penduduk yang selalu bertambah tidak hanya sebagai modal (SDM) pembangunan, namun juga dapat menyebabkan masalah. Apalagi jika sebagian penduduk tidak berhasil menempuh pendidikan yang layak, karena tingkat persaingan yang tinggi. Apalagi persaingan itu tidak sehat maka akan menambah masalah yang lebih besar. Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi sudah seharusnya mengatasi jumlah penduduk dengan mengaktifkan KB dengan lebih baik lagi agar dapat mencapai sasaran.

4.2. Kondisi Umum Pendidikan Kota Banjarmasin

4.2.1. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan di Kota Banjarmasin dapat diklasifikasi menjadi 2 menurut lembaga/instansi yakni Kementerian Pendidikan Nasional/DIKNAS yakni 630 sekolah meliputi dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Kementerian Agama/DEPAG yakni 132 sekolah meliputi RA, MI, MTs dan MA. Jumlah satuan pendidikan di Kota Banjarmasin yakni 762 sekolah yakni 312 satuan pendidikan atau 41% berstatus negeri dan 450 satuan pendidikan atau 59% berstatus swasta, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 12. Jumlah Satuan Pendidikan Menurut Status PNS dan Non PNS pada Instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL SEKOLAH		
		NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH
1	Banjarmasin Utara	57	48	105	0	21	21	57	69	126
2	Banjarmasin Selatan	73	66	139	5	33	38	78	99	177
3	Banjarmasin Tengah	49	89	138	4	15	19	53	104	157
4	Banjarmasin Timur	64	60	124	2	21	23	66	81	147
5	Banjarmasin Barat	58	66	124	0	31	31	58	97	155
	TOTAL	301	329	630	11	121	132	312	450	762
	%	48	52	100	8	92	100	41	59	100

Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa jumlah satuan pendidikan di Instansi Kementerian Pendidikan Nasional lebih tinggi/banyak yakni 630 dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan di Kementerian Agama yakni 312. Jumlah ini menggambarkan bahwa satuan pendidikan di Kota Banjarmasin mayoritas atau didominasi oleh Kemendikas. Selanjutnya menurut status satuan pendidikan menunjukkan bahwa status swasta lebih mayoritas yakni 59% dibandingkan status negeri yakni 41%. Kondisi ini menggambarkan bahwa peran satuan pendidikan swasta di Kota Banjarmasin memegang peran penting dalam mencetak SDM Kota Banjarmasin. Gambaran jumlah satuan pendidikan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 13. Jumlah Satuan Pendidikan di Instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JENJANG PENDIDIKAN					JLH
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	
1	Banjarmasin Utara	40	45	10	6	4	105
2	Banjarmasin Selatan	48	73	10	6	2	139
3	Banjarmasin Tengah	58	52	17	7	4	138
4	Banjarmasin Timur	48	58	9	6	3	124
5	Banjarmasin Barat	46	55	16	5	2	124
	TOTAL	240	283	62	30	15	630
	%	38.10	44.92	9.84	4.76	2.38	100.00

Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kal-Sel, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa satuan pendidikan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin menunjukkan jumlah terendah yakni SMK (2,38%) dan SMA (4,76%) sedangkan jumlah tertinggi yakni pada satuan pendidikan SD Negeri (44,92%) dan TK (38,10%). Rendahnya jumlah satuan pendidikan di SMK di Kota Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke satuan jenjang SMK, kondisi inilah yang menyebabkan stakeholder pendidikan khususnya swasta memiliki minat yang rendah pula dalam menyediakan satuan pendidikan SMK, meskipun SMK memiliki kompetensi yang relatif bagus dalam menciptakan lulusan siap kerja. Distribusi jumlah satuan pendidikan secara terperinci pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional di Kota Banjarmasin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 14. Jumlah Satuan Pendidikan pada Instansi Kementerian Pendidikan Nasional di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH										JLH
		TKN	TKS	SDN	SDS	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	
1	Banjarmasin Utara	0	40	42	3	9	1	4	2	2	2	105
2	Banjarmasin Selatan	0	48	64	9	6	4	3	3	0	2	139
3	Banjarmasin Tengah	1	57	39	13	6	11	2	5	1	3	138
4	Banjarmasin Timur	1	47	53	5	7	2	2	4	1	2	124
5	Banjarmasin Barat	0	46	49	6	6	10	2	3	1	1	124
	TOTAL	2	238	247	36	34	28	13	17	5	10	630
	%	0.32	37.78	39.21	5.71	5.40	4.44	2.06	2.70	0.79	1.59	100.00

Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kal-Sel, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa satuan pendidikan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin menunjukkan jumlah terendah yakni TK Negeri (0,32%) dan SMK Negeri (0,79%) sedangkan jumlah tertinggi yakni pada satuan pendidikan SD Negeri (39,21%) dan TK Swasta 37,78%. Rendahnya jumlah satuan pendidikan di satuan pendidikan TK Negeri lebih disebabkan pada sistem regulasi pemerintah yang hanya

menyediakan satuan pendidikan TK Negeri yakni hanya 2 untuk di Kota Banjarmasin. Satuan pendidikan.

Tabel 15. Jumlah Satuan Pendidikan pada Instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	6	0	8	0	6	0	1	21
2	Banjarmasin Selatan	9	3	15	2	6	0	3	38
3	Banjarmasin Tengah	3	1	9	1	3	2	0	19
4	Banjarmasin Timur	8	1	9	0	4	1	0	23
5	Banjarmasin Barat	14	0	10	0	6	0	1	31
	TOTAL	40	5	51	3	25	3	5	132
	%	30.30	3.79	38.64	2.27	18.94	2.27	3.79	100.00

Sumber: Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

4.2.2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tenaga pendidik atau guru merupakan agen pembelajaran yang memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia pendidikan. Keberadaan tenaga pendidik atau guru sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting guna meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Keberadaan jumlah guru di Kota Banjarmasin menurut instansi Kementerian Pendidikan Nasional yakni 9008 jiwa dengan perincian guru PNS 5718 jiwa (63%) dan non PNS 3290 jiwa (37%). Selanjutnya jumlah guru menurut Kementerian Agama di Kota Banjarmasin yakni 10.804 jiwa dengan perincian guru dengan status negeri (PNS) yakni 6067 jiwa (56%) dan status non PNS 4737 (44%). Gambaran kondisi guru di Kota Banjarmasin menurut instansi Kemdiknas dan Kemenag pada seluruh jenjang pendidikan yakni PAUD, Dasar dan Menengah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 16. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Menurut Status PNS dan Non PNS pada Instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL GURU		
		NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH
1	Banjarmasin Utara	1184	384	1568	43	272	315	1227	656	1883
2	Banjarmasin Selatan	1143	651	1794	165	354	519	1308	1005	2313
3	Banjarmasin Tengah	1086	1010	2096	130	136	266	1216	1146	2362
4	Banjarmasin Timur	1177	502	1679	109	329	438	1286	831	2117
5	Banjarmasin Barat	1128	743	1871	23	235	258	1151	978	2129
	TOTAL	5718	3290	9008	470	1326	1796	6188	4616	10804
	%	63	37	100	26	74	100	57	43	100

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 16 di ketahui bahwa perbandingan guru PNS dan PNS untuk instansi Kementerian Pendidikan Nasional di Kota Banjarmasin yakni 63%:37% dan instansi Kementerian Agama yakni 56%:44%. Kondisi ini menjelaskan bahwa sebanyak 37% dan

44% guru di kedua instansi tersebut masih berstatus non PNS, sehingga kondisi ini tentunya menggambarkan bahwa guru pada kedua instansi tersebut memiliki permasalahan pada rekrutmen guru dan tentunya kondisi akan berbanding lurus dengan aspek pendapatan guru. Distribusi guru pada masing-masing jenjang pendidikan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional tersaji pada tabel berikut.

Tabel 17. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Instansi Kementerian Pendidikan di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU BERDASARKAN SATUAN PENDIDIKAN										JLH
		TKN	TKS	SDN	SDS	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	
1	Banjarmasin Utara	0	235	584	33	288	16	199	46	113	54	1568
2	Banjarmasin Selatan	0	280	809	165	213	75	121	55	0	76	1794
3	Banjarmasin Tengah	22	464	559	277	328	161	115	51	62	57	2096
4	Banjarmasin Timur	13	279	740	60	277	34	95	78	52	51	1679
5	Banjarmasin Barat	0	284	666	92	260	193	91	129	111	45	1871
	TOTAL	35	1542	3358	627	1366	479	621	359	338	283	9008
	%	0.39	17.12	37.28	6.96	15.16	5.32	6.89	3.99	3.75	3.14	100.00

Sumber: LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik pada TK negeri dan SMK swasta merupakan satuan jenjang pendidikan terendah jumlah tenaga pendidiknya, sedangkan menurut satuan wilayah kecamatan menunjukkan Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai wilayah terendah jumlah guru pada seluruh satuan pendidikan. Rendahnya jumlah guru di wilayah tersebut berbanding lurus dengan rendahnya jumlah sekolah dibandingkan wilayah kecamatan lainnya, sebagaimana yang tersaji pada tabel rasio berikut.

Tabel 18. Rasio Tenaga Pendidik (Guru) dengan Jumlah Sekolah Instansi Kementerian Pendidikan di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	Rasio Guru dengan Satuan Pendidikan										JLH
		TKN	TKS	SDN	SDS	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	
1	Banjarmasin Utara	-	6	14	11	32	16	50	23	57	27	15
2	Banjarmasin Selatan	-	6	13	18	35	19	40	18	-	38	13
3	Banjarmasin Tengah	22	8	14	21	55	15	58	10	62	19	15
4	Banjarmasin Timur	13	6	14	12	40	17	48	20	52	26	14
5	Banjarmasin Barat	-	6	14	12	43	19	46	43	111	45	15
	TOTAL	18	6	14	17	40	17	48	21	68	28	14

Sumber: LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Rasio jumlah guru dengan jumlah satuan pendidikan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin yakni 1:14, dengan rasio terendah yakni pada TK Swasta 1:6 dan tertinggi yakni SMK Negeri 1:68. Rendahnya rasio guru pada masing-masing satuan jenjang pendidikan menggambarkan bahwa tugas tenaga pendidik di Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas profesinya sangatlah berat, sehingga akan membawa dampak pada kurang profesionalnya tenaga pendidik dalam menjalankan fungsi-fungsi profesi guru dalam mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa. Penambahan

jumlah tenaga pendidik merupakan alternatif solusi yang sangat strategis untuk dijalankan dalam rangka mengisi kekosongan tenaga pendidik pada masing-masing satuan jenjang pendidikan dengan melandaskan pada jumlah rombongan belajar pada masing-masing satuan jenjang pendidikan. Selanjutnya gambaran tenaga pendidik/guru pada Kementerian Agama di Kota Banjarmasin diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JUMLAH GURU BERDASARKAN SATUAN PENDIDIKAN							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	54	0	133	0	109	0	19	315
2	Banjarmasin Selatan	61	66	169	81	75	0	67	519
3	Banjarmasin Tengah	21	15	83	50	35	62	0	266
4	Banjarmasin Timur	11	18	288	0	64	57	0	438
5	Banjarmasin Barat	30	0	115	0	89	0	24	258
	TOTAL	177	99	788	131	372	119	110	10804
	%	1.64	0.92	7.29	1.21	3.44	1.10	1.02	100.00

Sumber: Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik/guru yakni MIN 0,92%, MA Swasta 1,02%, MAN 1,10% dan MTsN 1,21% dibandingkan pada jenjang satuan pendidikan lainnya di Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Rendahnya jumlah guru pada jenjang pendidikan sebagaimana pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa capaian pembelajaran relatif sulit untuk diwujudkan. Distribusi jumlah guru pada masing-masing status PNS dan Non PNS satuan jenjang pendidikan di Instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin diuraikan berikut.

Tabel 20. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) PNS Instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU BERDASARKAN STATUS PNS							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	1	0	29	0	11	0	2	43
2	Banjarmasin Selatan	9	47	33	61	6	0	9	165
3	Banjarmasin Tengah	0	9	10	45	9	57	0	130
4	Banjarmasin Timur	0	13	36	0	16	44	0	109
5	Banjarmasin Barat	1	0	11	0	11	0	0	23
	TOTAL	11	69	119	106	53	101	11	470
	%	2.34	14.68	25.32	22.55	11.28	21.49	2.34	100.00

Sumber: Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa tenaga pendidik/guru dengan status PNS menunjukkan persentase tertinggi pada satuan pendidikan MI Swasta yakni 25,32% dan terendah pada RA dan MA swasta yakni 2,34%. Kondisi ini sangatlah jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah tenaga pendidik yang berstatus non PNS yakni 74% atau tenaga

pendidik yang PNS hanya 26%. Rendahnya tenaga pendidik dengan status PNS menunjukkan pada rendahnya taraf hidup tenaga pendidik di Kota Banjarmasin khususnya di instansi Kementerian Agama karena tenaga pendidik dengan status non PNS relatif memiliki pendapatan yang rendah dibandingkan tenaga pendidik dengan status PNS, sehingga kondisi ini akan berdampak pada kinerja guru dalam menjalankan profesinya. Gambaran tenaga pendidik non PNS di Kementerian Agama tersaji pada tabel berikut.

Tabel 21. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) Non PNS Instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU BERDASARKAN STATUS NON PNS							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	53	0	104	0	98	0	17	272
2	Banjarmasin Selatan	52	19	136	20	69	0	58	354
3	Banjarmasin Tengah	21	6	73	5	26	5	0	136
4	Banjarmasin Timur	11	5	252	0	48	13	0	329
5	Banjarmasin Barat	29	0	104	0	78	0	24	235
	TOTAL	166	30	669	25	319	18	99	1326
	%	12.52	2.26	50.45	1.89	24.06	1.36	7.47	100.00

Sumber: Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 21 diketahui bahwa tenaga pendidik/guru Non PNS di instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin terendah di MAN dan MTsN dan tertinggi di satuan pendidikan MIS, RA, dan MTsS. Kondisi ini menjelaskan bahwa mayoritas satuan pendidikan dengan status swasta memiliki tenaga pendidik dengan status non PNS. Pengangkatan status tenaga pendidik dari Non PNS ke PNS merupakan alternatif kebijakan yang strategis dengan memprioritaskan guru-guru yang telah melaksanakan pengabdian pada profesi tenaga pendidik. Rekrutmen tenaga pendidik melalui formasi penerimaan pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama seyogyanya didasarkan pada rasio jumlah guru dengan jumlah satuan pendidikan pada masing-masing satuan jenjang pendidikan, agar lebih terarah serta efektif dan efisien. Rasio jumlah guru dan satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 22. Rasio Tenaga Pendidik dengan Satuan Pendidikan Instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	RASIO JLH GURU DENGAN SATUAN PENDIDIKAN							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	9	-	17	-	18	-	19	15
2	Banjarmasin Selatan	7	22	11	41	13	-	22	14
3	Banjarmasin Tengah	7	15	9	50	12	31	-	14
4	Banjarmasin Timur	1	18	32	-	16	57	-	19
5	Banjarmasin Barat	2	-	12	-	15	-	24	8
	TOTAL	4	20	15	44	15	40	22	14

Sumber: Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa rasio terendah jumlah guru dengan satuan pendidikan yakni pada satuan jenjang pendidikan RA yakni 1:4 dan tertinggi pada MTsN 1:44. Penambahan jumlah tenaga pendidik pada satuan jenjang pendidikan khususnya RA merupakan sebuah keharusan jika kita mendasarkan pada rasio pada tabel di atas, dimana diketahui bahwa satuan terdapat 4 guru pada satuan jenjang pendidikan RA. Rendahnya jumlah guru pada satuan jenjang pendidikan RA akan membawa dampak pada rendahnya kinerja tenaga pendidik dalam menjalankan tugas profesi sebagai tenaga pendidik karena sangat dimungkinkan bahwa tugas-tugas non profesi guru turut serta dilaksanakan dan jika hal ini berlangsung secara terus menerus tentunya akan membawa pengaruh yang kurang baik khususnya pada kinerja guru.

Selanjutnya tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Distribusi jumlah tenaga kependidikan berdasarkan status sekolah negeri dan swasta menurut kecamatan di Kota Banjarmasin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 23. Jumlah Tenaga Kependidikan Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMENAG			KEMDIKNAS			TOTAL TENAGA KEPENDIDIKAN		
		NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH
1	Banjarmasin Utara	0	41	41	170	65	235	170	106	276
2	Banjarmasin Selatan	26	45	71	164	109	273	190	154	344
3	Banjarmasin Tengah	24	25	49	144	134	278	168	159	327
4	Banjarmasin Timur	6	33	39	132	67	199	138	100	238
5	Banjarmasin Barat	0	49	49	143	85	228	143	134	277
	TOTAL	56	193	249	753	460	1,213	809	653	1,462
	%	22	78	100	62	38	100	55	45	100

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan LPMP Kalsel, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 23 jumlah tenaga kependidikan di Sekolah Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama berjumlah 56 orang dan di Sekolah Swasta berjumlah 193 orang, sedangkan jumlah tenaga kependidikan di Sekolah Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional berjumlah 753 orang sedangkan jumlah tenaga kependidikan di Sekolah Swasta berjumlah 460 orang.

Tabel 24. Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Kepangkatan Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS					KEMENAG					TOTAL				
		I	II	III	IV	JLH	I	II	III	IV	JLH	I	II	III	IV	JLH
1	Banjarmasin Utara	-	1	6	37	44	-	-	3	2	5	-	1	9	39	49
2	Banjarmasin Selatan	-	4	10	66	80	-	5	4	6	15	-	9	14	72	95
3	Banjarmasin Tengah	1	12	10	83	106	-	-	3	7	10	1	12	13	90	116
4	Banjarmasin Timur	-	16	10	58	84	-	1	4	6	11	-	17	14	64	95
5	Banjarmasin Barat	-	16	9	55	80	-	1	7	1	9	-	17	16	56	89
	TOTAL	1	49	45	299	394	-	7	21	22	50	1	56	66	321	444
	%	0	12	11	76	100	-	14	42	44	100	0	13	15	72	100

Sumber : LPMP Kalsel 2010 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 24 jumlah Kepala Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian agama dengan pangkat tertinggi IVb sebanyak 2 orang, IVa sebanyak 21 orang, IIIId sebanyak 3 orang, IIIc sebanyak 9 orang, IIId sebanyak 5 orang, IIIa sebanyak 3 orang, IIc sebanyak 6 orang, dan pangkat Iia sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk Kepala Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, pangkat tertinggi IIVe sebanyak 1 orang, IVc sebanyak 2 orang, IVb sebanyak 14 orang, IVa sebanyak 282 orang, IIIId sebanyak 24 orang, IIIc sebanyak 10 orang, IIId sebanyak 4 orang, IIIa sebanyak 7 orang, IIc sebanyak 7 orang, IId sebanyak 14 orang, Iia sebanyak 28 orang dan Ib sebanyak 1 orang.

Tabel 25. Jumlah Tenaga Kependidikan Non Kepala Sekolah Kementerian Agama dan Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS							KEMENAG							TOTAL						
		1	2	3	4	5	6	TOTAL	1	2	3	4	5	6	TOTAL	1	2	3	4	5	6	TOTAL
1	Banjarmasin Utara	29	60	33	1	4	3	130	5	1	2	0	2	3	13	34	61	35	1	6	6	143
2	Banjarmasin Selatan	35	33	40	0	13	13	134	21	4	4	4	6	4	43	56	37	44	4	19	17	177
3	Banjarmasin Tengah	25	49	41	4	17	4	140	9	9	4	2	4	2	30	34	58	45	6	21	6	170
4	Banjarmasin Timur	8	44	14	4	5	0	75	10	1	1	0	3	1	16	18	45	15	4	8	1	91
5	Banjarmasin Barat	24	48	12	10	10	0	104	9	2	1	0	2	1	15	33	50	13	10	12	1	119
	TOTAL	121	234	140	19	49	20	583	54	17	12	6	17	11	117	175	251	152	25	66	31	700
	%	21	40	24	3	8	3	100	46	15	10	5	15	9	100	25	36	22	4	9	4	100

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2010 (diolah)

catatan: 1= Kepala Administrasi, 2= Pelaksana Administrasi, 3=penjaga sekolah, 4=laboran, 5= pustakawan, 6=tenaga kebersihan

Berdasarkan Tabel 25 jumlah tenaga Kependidikan Non Kepala Sekolah bagi sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Untuk jabatan Kepala

Administrasi sebanyak 54 orang, Pelaksana Administrasi sebanyak 17 orang, penjaga sekolah sebanyak 12 orang, Laboratorium sebanyak 6 orang, Pustakawan sebanyak 17 orang, dan tenaga kebersihan sebanyak 11 orang, sedangkan untuk tenaga Non Kepala sekolah bagi sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional untuk jabatan kepala administrasi sebanyak 121 orang, Pelaksana Administrasi sebanyak 234 orang, penjaga sekolah sebanyak 140 orang, Laboratorium sebanyak 29 orang, Pustakawan sebanyak 49 orang, dan tenaga kebersihan sebanyak 20 orang.

4.3. Mutu Kualifikasi Tenaga Pendidik Kota Banjarmasin

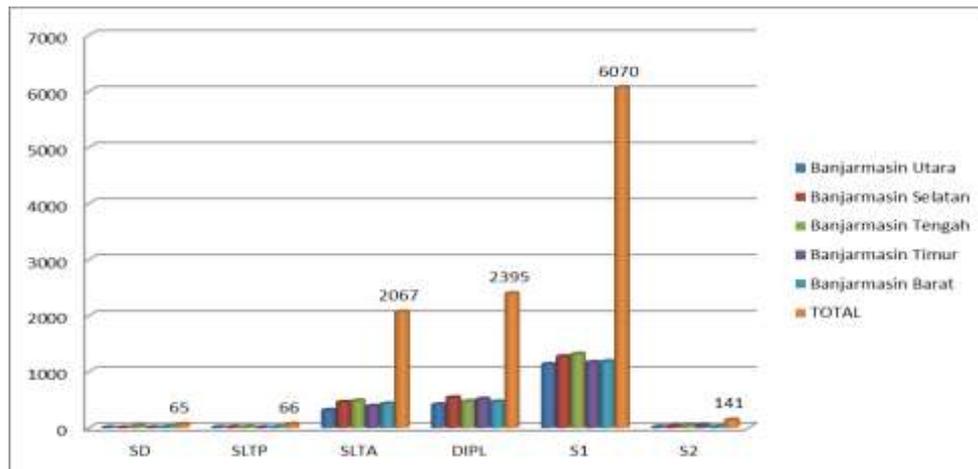
4.3.1. Jenjang Pendidikan Tenaga Pendidik

Jenjang pendidikan tenaga pendidik merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Jenjang pendidikan menjadi salah satu indikator seorang guru dalam hal penguasaan substansi materi yang diajarkannya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang mengamanatkan pendidikan minimum yakni S-1/Diploma IV. Kondisi riil di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa jumlah guru/tenaga pendidik dari seluruh jenjang pendidikan yakni 4495 jiwa dengan perincian S1 (33,70%), S2 (0,40%), Diploma (43,25%), SLTA (21,82%), SD (0,24%), sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 26. Distribusi Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	TOTAL						
		SD	SLTP	SLTA	DIPL	S1	S2	JLH
1	Banjarmasin Utara	5	9	313	411	1132	13	1883
2	Banjarmasin Selatan	4	14	458	539	1271	27	2313
3	Banjarmasin Tengah	32	20	481	469	1316	44	2362
4	Banjarmasin Timur	7	8	386	511	1167	38	2117
5	Banjarmasin Barat	17	15	429	465	1184	19	2129
	TOTAL	65	66	2067	2395	6070	141	10804
	%	0.60	0.61	19.13	22.17	56.18	1.31	100

Sumber: LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)



Gambar 3. Distribusi Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik di Kota Banjarmasin

Berdasarkan Tabel 26 dan gambar di atas diketahui bahwa distribusi kualifikasi pendidik di Kota Banjarmasin pada semua jenjang pendidikan (PAUD, Pendidikan dasar dan Menengah) diketahui mayoritas berkualifikasi S-1 yakni 56,18%, dan selebihnya pada jenjang kualifikasi Diploma 22,17%, SLTA 19,13%, S2 1,31%, SLTP 0,61% dan SD 0,60%. Secara terperinci distribusi kualifikasi akademik di instansi Kemdiknas dan Kemenag tersaji pada tabel berikut.

Tabel 27. Distribusi Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik pada Kemdiknas dan Kemenag di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS							KEMENAG						
		SD	SLTP	SLTA	DIPL	S1	S2	JLH	SD	SLTP	SLTA	DIPL	S1	S2	JLH
1	Banjarmasin Utara	5	7	251	388	906	11	1568	0	2	62	23	226	2	315
2	Banjarmasin Selatan	4	13	351	496	913	17	1794	0	1	107	43	358	10	519
3	Banjarmasin Tengah	31	17	442	454	1115	37	2096	1	3	39	15	201	7	266
4	Banjarmasin Timur	7	8	284	478	878	24	1679	0	0	102	33	289	14	438
5	Banjarmasin Barat	16	15	367	442	1012	19	1871	1	0	62	23	172	0	258
	TOTAL	63	60	1695	2258	4824	108	9008	2	6	372	137	1246	33	1796
	%	0.70	0.67	18.8	25.07	53.55	1.20	100	0.11	0.33	21	8	69	2	100

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Uraian sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 27 dan gambar di atas menunjukkan bahwa jenjang kualifikasi S-1 mendominasi jumlah tenaga pendidik di Kota Banjarmasin yakni 56,18% dengan perincian pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional yakni 53,55% dan Kementerian Agama yakni 69%. Kondisi ini menggambarkan bahwa guru-

guru di Kota Banjarmasin mayoritas telah memenuhi standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yakni No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi tenaga pendidik yakni harus S1. Tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1 sebagaimana yang tertera pada tabel di atas merupakan permasalahan yang harus segera tertangani dalam rangka memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi seorang tenaga pendidik. Pemberian beasiswa pada sejumlah tenaga pendidik yang belum memenuhi standar pendidikan merupakan langkah strategis yang harus dan terus diupayakan dalam rangka pemenuhan standar yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah. Selanjutnya distribusi tenaga pendidik menurut latarbelakang pendidikan dengan kualifikasi S1 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Distribusi Kualifikasi Latar Belakang Pendidikan Tenaga Pendidik di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL		
		S1 PEND	S1 NON PEND	JLH	S1 PEND	S1 NON PEND	JLH	S1 PEND	S1 NON PEND	JLH
1	Banjarmasin Utara	801	105	906	192	34	226	993	139	1132
2	Banjarmasin Selatan	787	126	913	317	41	358	1104	167	1271
3	Banjarmasin Tengah	969	146	1115	186	15	201	1155	161	1316
4	Banjarmasin Timur	773	105	878	248	41	289	1021	146	1167
5	Banjarmasin Barat	860	152	1012	142	30	172	1002	182	1184
	TOTAL	4190	634	4824	1085	161	1246	5275	795	6070
	%	87	13	100	87	13	100	87	13	100

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 28 diketahui bahwa total tenaga pendidik yang telah memenuhi kualifikasi S1 di Kota Banjarmasin yakni 6070 jiwa dari total tenaga pendidik 10.804 jiwa. Jumlah tenaga pendidik S1 yang latarbelakang pendidikannya S1 bidang pendidikan yakni 87% dengan perincian di instansi Kemdiknas dan Kemenag yakni 87% . Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat 13% tenaga pendidik jenjang kualifikasi S1 yang berlatarbelakang pendidikan non pendidik. Terdapatnya 13% guru yang memiliki latarbelakang non pendidikan tersebut mengisyaratkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan khususnya tenaga pendidik yang belum memenuhi syarat mendidik.

4.3.2. Kepemilikan Akta IV Tenaga Pendidik

Akta IV merupakan dokumen yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesi tenaga pendidik. Dokumen akta IV didalamnya termuat beberapa mata kuliah kependidikan sebagai bekal tenaga calon pendidik untuk menerapkan ilmunya pada peserta didiknya. Mencermati pemberlakuan Undang-Undang tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana profesi guru hanya boleh dijabat oleh para lulusan pendidikan

keguruan dan mereka yang memiliki sertifikasi Akta Mengajar bagi lulusan pendidikan non-keguruan, maka pemilikan sertifikat akta mengajar merupakan keharusan bagi sarjana non-keguruan yang ingin berprofesi sebagai guru.

Guru adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih pada jalur pendidikan formal dan non formal secara profesional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk menjadi guru maka seseorang dipersyaratkan memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang dikeluarkan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Pemberlakuan ini tentunya berlaku untuk semua daerah di Republik Indonesia dan seyogyanya telah diterapkan pada seluruh stakeholder pendidikan. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diuraikan di atas belum mampu terealisasi secara maksimal di daerah termasuk Kota Banjarmasin.

Kondisi kepemilikan AKTA IV pada tenaga pendidik di Kota Banjarmasin pada seluruh satuan jenjang pendidikan menunjukkan 65% atau 2911 jiwa telah memiliki dokumen AKTA IV dan 35% atau 1584 jiwa belum memiliki AKTA IV, secara terperinci tersaji pada tabel berikut.

Tabel 30. Distribusi Kepemilikan AKTA Mengajar Tenaga Pendidik di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL AKTA DAN NON AKTA		
		AKTA	NON AKTA	JLH	AKTA	NON AKTA	JLH	AKTA	NON AKTA	JLH
1	Banjarmasin Utara	873	695	1568	221	94	315	1094	789	1883
2	Banjarmasin Selatan	864	930	1794	344	175	519	1208	1105	2313
3	Banjarmasin Tengah	1101	995	2096	213	53	266	1314	1048	2362
4	Banjarmasin Timur	875	804	1679	292	146	438	1167	950	2117
5	Banjarmasin Barat	975	896	1871	143	115	258	1118	1011	2129
	TOTAL	4688	4320	9008	1213	583	1796	5901	4903	10804
	%	52	48	100	68	32	100	55	45	100

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 30 diketahui bahwa secara keseluruhan tenaga pendidik di Kota Banjarmasin pada semua jenjang pendidikan menunjukkan 55% memiliki AKTA mengajar dan 45% belum memiliki AKTA Mengajar, artinya masih terdapat tenaga pendidik di Kota Banjarmasin yang belum layak mengajar. Kondisi ini merupakan permasalahan dalam peningkatan mutu tenaga pendidik yang tentunya dapat berdampak pada mutu lulusan. Secara terperinci pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional di Kota Banjarmasin diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Distribusi Kepemilikan AKTA Mengajar Tenaga Pendidik Instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA IV										JLH
		TKN	TKS	SDN	SDS	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	
1	Banjarmasin Utara	-	78	158	22	265	11	184	40	84	31	873
2	Banjarmasin Selatan	-	69	252	92	192	61	109	42	-	47	864
3	Banjarmasin Tengah	9	133	151	166	300	118	107	36	51	30	1,101
4	Banjarmasin Timur	2	90	258	40	244	26	81	62	35	37	875
5	Banjarmasin Barat	-	75	194	29	229	159	80	108	68	33	975
	AKTA IV	11	445	1,013	349	1,230	375	561	288	238	178	4,688
	Non AKTA IV	24	1,097	2,369	254	136	104	60	71	100	105	4,320
	TOTAL	35	1,542	3,382	603	1,366	479	621	359	338	283	9,008
	% AKTA	31.43	28.86	29.95	57.88	90.04	78.29	90.34	80.22	70.41	62.90	52.04
	% TANPA AKTA	68.57	71.14	70.05	42.12	9.96	21.71	9.66	19.78	29.59	37.10	47.96

Sumber: LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Kepemilikan AKTA Mengajar (AKTA IV) pada tenaga pendidik di instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin sebagaimana yang tersaji pada tabel 26 diketahui bahwa tenaga pendidik pada satuan jenjang pendidikan yang memiliki AKTA mengajar yakni 52,04% dan tidak memiliki AKTA mengajar 47,96% dan angka tertinggi yang tidak memiliki angka mengajar yakni pada satuan pendidikan TK swasta 71,14%. Selanjutnya distribusi kepemilikan akta mengajar tenaga pendidik di instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 32. Distribusi Kepemilikan AKTA Mengajar Tenaga Pendidik Instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA IV							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	14	0	110	0	82	0	15	221
2	Banjarmasin Selatan	11	50	112	76	44	0	51	344
3	Banjarmasin Tengah	11	10	59	48	27	58	0	213
4	Banjarmasin Timur	1	11	178	0	57	45	0	292
5	Banjarmasin Barat	5	0	61	0	58	0	19	143
	AKTA	42	71	520	124	268	103	85	1,213
	Non AKTA	135	28	268	7	104	16	25	583
	TOTAL	177	99	788	131	372	119	110	1,796
	% AKTA	24	72	66	95	72	87	77	68
	% TANPA AKTA	76	28	34	5	28	13	23	32

Sumber: Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 32 diketahui bahwa tenaga pendidik di Kementerian Agama Kota Banjarmasin pada seluruh satuan jenjang pendidikan menunjukkan 68% tenaga pendidikan memiliki AKTA Mengajar dan 32% tenaga pendidik tidak memiliki AKTA Mengajar. Satuan Jenjang Pendidikan yang tertinggi tidak memiliki AKTA Mengajar yakni RA 76%.

Terdapatnya temuan sejumlah satuan pendidikan dimasing-masing wilayah kecamatan dan satuan jenjang pendidikan di Kota Banjarmasin yang belum memiliki AKTA IV sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan suatu kendala yang relatif serius dalam proses belajar mengajar dan dapat berdampak pada mutu lulusan. Program Akta Mengajar IV merupakan program pembentukan kemampuan mengajar yang dapat diperoleh melalui dua cara. Pertama, terintegrasi (*concurrent model*), yaitu program pendidikan bagi calon guru yang mengupayakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian sebagai sumber bahan ajar secara bersamaan dengan pembentukan kemampuan mengajar. Kedua, bersambungan (*consecutive model*), yaitu program pendidikan bagi calon guru yang (sebelumnya) telah menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian sebagai sumber bahan ajar yang mengupayakan pembentukan kemampuan mengajar.

Terdapatnya tenaga pendidik yang belum memiliki AKTA IV akan berdampak pada resiko yang lebih besar jika status AKTA IV telah ditutup secara permanen oleh pemerintah dan diganti dengan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). PLPG harus diikuti semua guru di Indonesia bagi mereka yang tidak lulus Portofolio, dan PLPG merupakan syarat utama untuk mendapatkan Sertifikasi Guru. Keberadaan PLPG sebagai pengganti AKTA IV merupakan serangkaian persyaratan bagi calon tenaga pendidik yang memiliki kesungguhan untuk menjadikan guru sebagai profesinya. Seperti layaknya dokter, hanya mereka yang lulus sarjana kedokteran yang bisa menjadi dokter. Guru pun seharusnya demikian, hanya lulusan fakultas pendidikan saja yang bisa menjadi guru. sebuah pertanyaan yang patut direnungkan adalah bagaimana jika yang menjadi dokter adalah seorang sarjana teknik, sarjana ekonomi, atau sarjana non kedokteran lainnya, dan bagaimana jika mereka yang menjadi guru berasal dari sarjana non-pendidikan yang tidak memiliki dasar keguruan.

Lulusan non-pendidikan yang tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar juga bukan lulusan terbaik, umumnya mereka putar haluan menjadi guru karena sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga guru tidak lagi dimaknai sebagai pengabdian untuk mengembangkan *know-what, knowledge* (pengetahuan), *know-why, attitude* (sikap), *know-why skill* (ketrampilan) kepada peserta didik. Fenomena ini memang suatu keuntungan bagi yang membutuhkan atau terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan harus kerja. Namun masalahnya mungkin mengenai mutu pendidikan yang ditawarkan para pengelola akta IV, Apakah dapat dijamin menghasilkan tenaga pengajar dan pendidik yang handal, atau sekadar memenuhi formalitas kepemilikan sertifikat dan memenuhi syarat sertifikasi.

4.3.3. Kesesuaian Mengajar Tenaga Pendidik

Kesesuaian mengajar tenaga pendidik merupakan indikator utama dalam pencapaian mutu proses pembelajaran yang akan berdampak secara positif pada output pembelajaran berupa hasil belajar siswa. Kesesuaian mengajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesesuaian latarbelakang pendidikan tinggi asal seorang guru. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tenaga pendidik di Kota Banjarmasin pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang sesuai yakni 63% dan tidak sesuai 37% dari total populasi tenaga pendidik 9008 jiwa dan 796 jiwa pada instansi Kementerian Agama. Secara rinci jumlah tenaga pendidik yang sesuai mengajar dengan latarbelakang pendidikan tinggi asal tersaji pada tabel berikut.

Tabel 33. Distribusi Kesesuaian Mengajar Tenaga Pendidik di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	JLH	SESUAI	TIDAK SESUAI	JLH	SESUAI	TIDAK SESUAI	JLH
1	Banjarmasin Utara	1035	533	1568	178	137	315	1213	670	1883
2	Banjarmasin Selatan	1098	696	1794	341	178	519	1439	874	2313
3	Banjarmasin Tengah	1241	855	2096	203	63	266	1444	918	2362
4	Banjarmasin Timur	1094	585	1679	280	158	438	1374	743	2117
5	Banjarmasin Barat	1183	688	1871	153	105	258	1336	793	2129
	TOTAL	5651	3357	9008	1155	641	1796	6806	3998	10804
	%	63	37	100	64	36	100	63	37	100

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Selanjutnya jumlah guru yang mengajar sesuai latarbelakang pendidikan pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan 63% tenaga pendidik sesuai mengajar dengan latarbelakang pendidikan dan 37% tidak sesuai mengajar dengan latarbelakang pendidikan. Secara rinci kesesuaian mengajar tenaga pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34.
Distribusi Kesesuaian Mengajar Tenaga Pendidik di Instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN SESUAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN										JLH
		TKN	TKS	SDN	SDS	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	
1	Banjarmasin Utara	0	45	388	18	258	10	163	42	81	30	1035
2	Banjarmasin Selatan	0	39	520	107	192	55	105	34	0	46	1098
3	Banjarmasin Tengah	5	70	377	177	295	117	95	33	42	30	1241
4	Banjarmasin Timur	2	64	511	49	251	27	74	52	32	32	1094
5	Banjarmasin Barat	0	62	459	34	228	148	74	99	47	32	1183
	SESUAI	7	280	2255	385	1224	357	511	260	202	170	5651
	TIDAK SESUAI	28	1,262	219	1,126	142	122	110	99	136	113	3,357
	TOTAL	35	1542	2474	1511	1366	479	621	359	338	283	9008
	% SESUAI	20	18	91	25	90	75	82	72	60	60	63
	% TIDAK SESUAI	80	82	9	75	10	25	18	28	40	40	37

Sumber: LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 34 diketahui bahwa 37% tenaga pendidik di Kota Banjarmasin tidak sesuai mengajar dengan latarbelakang pendidikan tenaga pendidik. Satuan pendidikan tertinggi tidak sesuai yakni TK Swasta dan Negeri yakni 80% dan 82%, serta SD Swasta 75%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada satuan jenjang pendidikan tersebut mayoritas tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan pada saat menempuh di Perguruan tinggi atau tidak memiliki latarbelakang pendidikan dengan jenjang S1. Distribusi tenaga pendidik pada masing-masing satuan jenjang pendidikan yang tidak sesuai mengajar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 35. Distribusi Ketidaksesuaian Mengajar Tenaga Pendidik di Instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN TIDAK SESUAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN										JLH
		TKN	TKS	SDN	SDS	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	
1	Banjarmasin Utara	0	190	15	196	30	6	36	4	32	24	533
2	Banjarmasin Selatan	0	241	58	289	21	20	16	21	0	30	696
3	Banjarmasin Tengah	17	394	99	183	33	44	20	18	20	27	855
4	Banjarmasin Timur	11	215	13	227	26	7	21	26	20	19	585
5	Banjarmasin Barat	0	222	34	231	32	45	17	30	64	13	688
	TIDAK SESUAI	28	1262	219	1126	142	122	110	99	136	113	3357
	SESUAI	7	280	2,255	385	1,224	357	511	260	202	170	5,651
	TOTAL	35	1542	2474	1511	1366	479	621	359	338	283	9008
	% TIDAK SESUAI	80	82	9	75	10	25	18	28	40	40	37
	% SESUAI	20	18	91	25	90	75	82	72	60	60	63

Sumber: LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Selanjutnya informasi tenaga pendidik dalam hal kesesuaian mengajar pada instansi Kementerian Agama di Kota Banjarmasin diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 36. Distribusi Kesesuaian Mengajar Tenaga Pendidik di Instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN SESUAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	22	0	59	0	82	0	15	178
2	Banjarmasin Selatan	17	41	112	76	44	0	51	341
3	Banjarmasin Tengah	12	7	51	48	27	58	0	203
4	Banjarmasin Timur	1	10	165	0	57	47	0	280
5	Banjarmasin Barat	12	0	64	0	58	0	19	153
	SESUAI	64	58	451	124	268	105	85	1155
	TIDAK SESUAI	113	41	337	7	104	14	25	641
	TOTAL	177	99	788	131	372	119	110	1796
	% SESUAI	36.16	58.59	57.23	94.66	72.04	88.24	77.27	64.31
	% TIDAK SESUAI	63.84	41.41	42.77	5.34	27.96	11.76	22.73	35.69

Sumber: Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 36 diketahui 64,31% yang sesuai dan 35,69% yang tidak sesuai mengajar menurut latarbelakang pendidikan guru. Satuan pendidikan yang memiliki persentase tertinggi kesesuaian tenaga pendidik yakni pada MTsN (94, 66%) dan MAN (88,24%) sedangkan satuan pendidikan dengan persentase kesesuaian terendah yakni pada RA (63,84%). Distribusi tenaga pendidik yang tidak sesuai pada instansi Kementerian Agama tersaji pada tabel berikut.

Tabel 37. Distribusi Ketidaksesuaian Mengajar Tenaga Pendidik di Instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	JLH GURU YANG MENGAJAR MATA PELAJARAN TIDAK SESUAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN							JLH
		RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	
1	Banjarmasin Utara	32	0	74	0	27	0	4	137
2	Banjarmasin Selatan	44	25	57	5	31	0	16	178
3	Banjarmasin Tengah	9	8	32	2	8	4	0	63
4	Banjarmasin Timur	10	8	123	0	7	10	0	158
5	Banjarmasin Barat	18	0	51	0	31	0	5	105
	TIDAK SESUAI	113	41	337	7	104	14	25	641
	SESUAI	64	58	451	124	268	105	85	1,155
	TOTAL	177	99	788	131	372	119	110	1796
	% TIDAK SESUAI	63.84	41.41	42.77	5.34	27.96	11.76	22.73	35.69
	% SESUAI	36.16	58.59	57.23	94.66	72.04	88.24	77.27	64.31

Sumber: Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 37 diketahui bahwa satuan jenjang pendidikan tertinggi tidak sesuai mengajar yakni RA (63,84%), MIS (42,77%) dan MIN (41,41%), dan beberapa satuan jenjang pendidikan sebagaimana yang telah disajikan pada tabel di atas. Terdapatnya sejumlah tenaga pendidik yang tidak sesuai mengajar pada satuan jenjang pendidikan di

instansi Kementerian Agama menggambarkan bahwa tenaga pengajar relatif belum siap mendidik atau mengajar namun telah terjun atau menjadikan guru sebagai profesi. Fenomena terdapatnya guru yang tidak sesuai mengajar merupakan menjadi bahan yang sangat penting pada sistem regulasi pemerintah khususnya dibidang pendidikan untuk tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi pada sejumlah tenaga pendidik yang tidak memiliki kewenangan untuk mengajar. Ketidaksesuaian mengajar tenaga pendidik yang dipaksakan akan berdampak pada rendahnya mutu proses pembelajaran yang disajikan dan akan berpengaruh pada rendahnya mutu lulusan.

4.4. Mutu Kualifikasi Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin

Kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang standar kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan meliputi kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan penjaga sekolah. Indikator mutu tenaga kependidikan dapat diukur adalah jenjang pendidikan minimum, latar belakang pendidikan, dan kepemilikan sertifikat profesi (khusus bagi kepala sekolah). Jumlah tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam memajukan mutu pendidikan pada satuan jenjang pendidikan tertentu. Keberadaan tenaga kependidikan dalam menunjang tugas atau fungsi-fungsi administrasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan berbagai fungsi-fungsi lainnya. Tenaga kependidikan di Kota Banjarmasin pada dua instansi yakni Kementerian Pendidikan Nasional dan Agama terdapat 1462 jiwa dengan perincian 1213 jiwa di instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan 249 jiwa di instansi Kementerian Agama, sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 38. Distribusi Tenaga Kependidikan di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMENAG			KEMDIKNAS			TOTAL TENAGA KEPENDIDIKAN		
		NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH
1	Banjarmasin Utara	0	41	41	170	65	235	170	106	276
2	Banjarmasin Selatan	26	45	71	164	109	273	190	154	344
3	Banjarmasin Tengah	24	25	49	144	134	278	168	159	327
4	Banjarmasin Timur	6	33	39	132	67	199	138	100	238
5	Banjarmasin Barat	0	49	49	143	85	228	143	134	277
	TOTAL	56	193	249	753	460	1,213	809	653	1,462
	%	22	78	100	62	38	100	55	45	100

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Selanjutnya rasio tenaga kependidikan dengan satuan pendidikan di Kota Banjarmasin menunjukkan pada satuan jenjang pendidikan swasta memiliki rasio 1:1 dan satuan pendidikan dengan status negeri dengan rasio 1:3. Kondisi rasio tenaga pendidik dengan satuan pendidikan pada masing-masing wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 39. Rasio Tenaga Kependidikan dengan Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	TENAGA KEPENDIDIKAN			SATUAN PENDIDIKAN			RASIO		
		NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH	NEGERI	SWASTA	JLH
1	Banjarmasin Utara	170	106	276	57	69	126	3	2	2
2	Banjarmasin Selatan	190	154	344	78	99	177	2	2	2
3	Banjarmasin Tengah	168	159	327	53	104	157	3	2	2
4	Banjarmasin Timur	138	100	238	66	81	147	2	1	2
5	Banjarmasin Barat	143	134	277	58	97	155	2	1	2
	TOTAL	809	653	1462	312	450	762	3	1	2

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 39 di atas diketahui bahwa pada satuan pendidikan dengan status negeri dengan rasio 1:3 dan swasta dengan rasio 1:2. Hal menunjukkan bahwa satu satuan pendidikan dilayani oleh tenaga kependidikan 3 orang untuk satuan pendidikan negeri dan satu satuan pendidikan hanya dilayani oleh 2 orang tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan swasta. Kondisi yang telah tergambar pada tabel di atas menunjukkan kurangnya populasi tenaga kependidikan di Kota Banjarmasin, sehingga layanan pendidikan secara otomatis tentunya mayoritas diselesaikan oleh tenaga pendidik (guru). Tidak optimalnya jumlah tenaga kependidikan di Kota Banjarmasin merupakan problem serius sehingga sangat diperlukan rekrutmen PNS tenaga kependidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan agar fungsi guru sebagai tenaga pendidik tetap fokus pada bidang profesinya.

4.4.1. Tenaga Kepala Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007, Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin sebuah satuan pendidikan. Kualifikasi kepala sekolah sama dengan kualifikasi guru, yaitu minimal berkualifikasi S1. Hanya saja ditambahkan dengan syarat memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah. Distribusi jumlah tenaga kepala sekolah menurut tingkan pendidikan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Distribusi Jumlah Tenaga Kepala Sekolah menurut Status PNS di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL		
		PNS	NON PNS	JLH	PNS	NON PNS	JLH	PNS	NON PNS	JLH
1	Banjarmasin Utara	44	61	105	5	23	28	49	84	133
2	Banjarmasin Selatan	80	59	139	15	15	30	95	74	169
3	Banjarmasin Tengah	106	32	138	10	9	19	116	41	157
4	Banjarmasin Timur	84	40	124	11	12	23	95	52	147
5	Banjarmasin Barat	80	44	124	9	25	34	89	69	158
	TOTAL	394	236	630	50	84	134	444	320	764
	%	62.54	37.46	100.00	37.31	62.69	100.00	58.12	41.88	100.00

Sumber: LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 40 diketahui bahwa jumlah tenaga kepala sekolah in instansi Kementerian Pendidikan Nasional dengan status PNS yakni 62,54% (394 jiwa) dan non PNS 37,46% (236 jiwa) sedangkan di instansi Kementerian Agama dengan status PNS 37,31% (50 jiwa) dan non PNS 62,69% (84 jiwa). Secara keseluruhan jumlah kepala dengan status PNS yakni 58,12% (444 jiwa) sedangkan non PNS 41,88% (320 jiwa). Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat jumlah kepala sekolah yang berstatus non PNS sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak kepala sekolah di Kota Banjarmasin yang hidup dalam taraf kesejahteraan rendah, dengan asumsi bahwa rata-rata pendapatan kepala sekolah dengan status PNS relatif lebih baik dan stabil dibandingkan non PNS.

Tabel 41. Distribusi Jumlah Tenaga Kepala Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS						KEMENAG						TOTAL					
		SD	SLTA	DIPL	S1	S2	JLH	SD	SLTA	DIPL	S1	S2	JLH	SD	SLTA	DIPL	S1	S2	JLH
1	Banjarmasin Utara	0	18	39	43	4	104	0	3	8	17	0	28	0	21	47	60	4	132
2	Banjarmasin Selatan	1	33	25	78	2	139	0	6	2	17	3	28	1	39	27	95	5	167
3	Banjarmasin Tengah	0	34	8	88	8	138	0	1	2	14	2	19	0	35	10	102	10	157
4	Banjarmasin Timur	0	28	6	76	12	122	0	6	4	12	1	23	0	34	10	88	13	145
5	Banjarmasin Barat	1	27	12	80	4	124	0	7	4	23	0	34	1	34	16	103	4	158
	TOTAL	2	140	90	365	30	627	0	23	20	83	6	132	2	163	110	448	36	759
	%	0.32	22.33	14.35	58.21	4.78	100	-	17.42	15.15	62.88	4.55	100	0.26	21.48	14.49	59.03	4.74	100

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 41 diketahui bahwa jumlah tenaga kepala sekolah di Kota Banjarmasin menurut jenjang pendidikan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional mayoritas S1 yakni 58,21% (365 jiwa) meskipun masih terdapat kepala sekolah yang memiliki jenjang pendidikan SD (0,32%), SLTA (22,33%), dan Diploma (14,35%), sedangkan kepala sekolah yang memiliki kualifikasi S2 yakni 4,78% (30 jiwa) dari 627

satuan pendidikan. Selanjutnya di instansi Kementerian Agama kepala sekolah yang berkualifikasi S1 yakni 62,88%, S2 yakni 4,55% (6 jiwa) dari 132 satuan pendidikan. Kondisi yang tergambar pada tabel di atas menunjukkan kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan non S1 meliputi SD (0, 26%). SLTA (21,34%), dan Diploma (14,40%) dengan total 275 jiwa atau 36% merupakan problem serius dalam memenuhi standar nasional mengenai tenaga pendidik dan kependidikan Nomor 16 Tahun 2007. Distribusi pemenuhan standard nasional menurut kualifikasi akademik tenaga Kependidikan Kepala Sekolah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 42. Distribusi Jumlah Kualifikasi Akademik Tenaga Kepala Sekolah

NO	INSTANSI	S1 dan S2 (*	Non S1	TOTAL
1	KEMDIKNAS	395	232	627
2	KEMENAG	89	43	132
	TOTAL	484	275	759
	%	64	36	100

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)
Keterangan: *) memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007

Selanjutnya distribusi tenaga kepala sekolah (PNS) menurut tingkat golongan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Distribusi Jumlah Tenaga Kepala Sekolah (PNS)
Berdasarkan Tingkat Golongan

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS					KEMENAG					TOTAL				
		I	II	III	IV	JLH	I	II	III	IV	JLH	I	II	III	IV	JLH
1	Banjarmasin Utara	-	1	6	37	44	-	-	3	2	5	-	1	9	39	49
2	Banjarmasin Selatan	-	4	10	66	80	-	5	4	6	15	-	9	14	72	95
3	Banjarmasin Tengah	1	12	10	83	106	-	-	3	7	10	1	12	13	90	116
4	Banjarmasin Timur	-	16	10	58	84	-	1	4	6	11	-	17	14	64	95
5	Banjarmasin Barat	-	16	9	55	80	-	1	7	1	9	-	17	16	56	89
	TOTAL	1	49	45	299	394	-	7	21	22	50	1	56	66	321	444
	%	0	12	11	76	100	-	14	42	44	100	0	13	15	72	100

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 43 diketahui jumlah tenaga Kepala Sekolah yang PNS menurut golongan terdapat golongan I jiwa, golongan II (56 jiwa atau 13%), golongan III (66 jiwa atau 15%), golongan IV (321 jiwa atau 72%) dari total tenaga kepala sekolah PNS yakni 444 jiwa. Selanjutnya tenaga kepala sekolah menurut latarbelakang pendidikan di Kota Banjarmasin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 44. Distribusi Jumlah Tenaga Kepala Sekolah Berdasarkan S1 Pendidikan dan Non Pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional dan Agama Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	KEMDIKNAS			KEMENAG			TOTAL		
		S-1 PEND	S1-NON PEND	JLH	S-1 PEND	S1-NON PEND	JLH	S-1 PEND	S1-NON PEND	JLH
1	Banjarmasin Utara	37	6	43	17	-	17	54	6	60
2	Banjarmasin Selatan	67	11	78	15	2	17	82	13	95
3	Banjarmasin Tengah	74	14	88	14	-	14	88	14	102
4	Banjarmasin Timur	72	4	76	12	-	12	84	4	88
5	Banjarmasin Barat	74	6	80	22	1	23	96	7	103
	TOTAL	324	41	365	80	3	83	404	44	448
	%	89	11	100	96	4	100	90	10	100

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 44 di atas diketahui bahwa kepala sekolah menurut latarbelakang pendidikan di Kota Banjarmasin yang latarbelakang pendidikan yakni 90% (404 jiwa) dan non latar belakang pendidikan yakni 10% (44 jiwa). Kondisi ini menjelaskan bahwa masih terdapat 10% tenaga kepala sekolah yang berlatarbelakang non pendidikan sehingga diperlukan kebijakan pemerintah dalam rangka penyetaraan latarbelakang pendidikan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentan standar kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

4.4.2. Tenaga Kependidikan Non Kepala Sekolah

Tenaga kependidikan non kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian adalah adalah kepala administrasi, pelaksana administrasi, laboran, pustakawan, penjaga sekolah dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan non kepala sekolah selanjutnya diukur menurut latar belakang pendidikan untuk mengetahui standar kualifikasi akademik tenaga kependidikan non kepala sekolah. Distribusi tenaga kependidikan non kepala sekolah pada kepala administrasi diuraikan pada tabel berikut.

4.4.2.1. Tenaga Administrasi

Pada Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Admnistrasi disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam Standar Tenaga Administrasi yakni meliputi: kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Petugas layanan khusus yang dimaksud adalah: pesuruh, penjaga sekolah/madrasah, pengemudi, tukang kebun, dan penjaga kebersihan. Kualifikasi akademik masing-masing tenaga administrasi berbeda sesuai dengan tugas yang diembannya dan tingkat satuan pendidikan tempatnya bekerja. Untuk lebih jelas, berikut ditampilkan tenaga administrasi pada pendidikan dasar (TK) dan menengah (SLTA).

Tabel 45. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Kepala Administrasi menurut Satuan Pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TK	TK S	SDN	SD S	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	JLH	%
1	SMP	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2.50
2	SMA	0	0	22	3	14	3	4	5	1	0	52	43.33
3	DIPLOMA	0	0	2	3	4	2	0	0	0	1	12	10.00
4	S1	0	0	22	4	14	4	6	1	2	0	53	44.17
	TOTAL	0	0	47	12	32	9	10	6	3	1	120	100.00
	%	-	-	39.17	10.00	26.67	7.50	8.33	5.00	2.50	0.83	100.00	

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Pendidik dan Kependidikan, maka kepala Tenaga Administrasi pada tingkat SMA/MA/SMK harus berkualifikasi S1. Di samping itu, S1 yang dimiliki itu harus relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 tahun.

Berdasarkan Tabel 40, maka dari 120 Kepala Administrasi di Kota Banjarmasin hanya terdapat 53 Kepala Administrasi yang memenuhi kualifikasi akademik, yaitu S1. Tentu secara kuantitas masih memprihatinkan, karena belum mencapai jumlah di atas 50% dari total Kepala Administrasi. Program peningkatan tenaga kependidikan, khususnya Kepala Tenaga Administrasi perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Tabel 46. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Kepala Administrasi menurut satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	JLH	%
1	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	SMA	2	5	16	0	8	0	1	32	52.46
3	DIPLOMA	1	2	5	0	0	0	2	10	16.39
4	S1	0	4	4	2	6	0	3	19	31.15
	TOTAL	3	11	25	2	14	0	6	61	100.00
	%	4.92	18.03	40.98	3.28	22.95	-	9.84	100.00	

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Tabel 46 memberikan gambaran bahwa dari 61 orang kepala administrasi pada satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin hanya 19 orang yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1. Dalam amanah Permendiknas Nomor 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa minimal kualifikasi pendidikan seorang Kepala Administrasi yaitu S1 atau D3 dengan mengantongi pengalaman 8 tahun. Karena itu, sebuah tantangan bagi Kementerian Agama Kota Banjarmasin untuk mengupayakan peningkatan kualifikasi kepala administrasi.

Tabel 47. Persentase (%) Rasio Jumlah Kepala Administrasi dengan Jumlah Satuan Pendidikan

NO	INSTANSI	JUMLAH KEPALA ADMINISTRASI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE (%) RASIO
1	KEMDIKNAS	120	630	19
2	KEMENAG	61	132	46
3	TOTAL	181	762	24

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2011 (diolah)

Pada Tabel 42 tampak bahwa persentase rasio antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yakni 19% dan 46%. Rasio Kemendiknas cukup memprihatinkan, karena belum mencapai atau mendekati rasio 50%, sementara kepala administrasi Kemendepag mencapai 46 % rasio antara jumlah kepala administrasi dan jumlah satuan pendidikan. Karena itu tentu hal ini menjadi pertimbangan tersendiri oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan persentasenya, sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat lebih optimal.

Tabel 48. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Pelaksana Administrasi menurut satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TK	TK S	SDN	SD S	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.86
2	SMP	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.86
3	SMA	0	0	0	0	88	7	55	6	22	7	185	79.40
4	DIPLOMA	0	0	0	0	4	3	5	0	2	0	14	6.01
5	S1	0	0	0	0	11	0	8	5	4	2	30	12.88
	TOTAL	0	0	0	0	107	10	68	11	28	9	233	100.00
	%	-	-	-	-	45.92	4.29	29.18	4.72	12.02	3.86	100.00	

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Berdasarkan Permendiknas No. 19 tahun 2005 tentang tenaga pendidik dan kependidikan menyebutkan bahwa kualifikasi tenaga pelaksana administrasi minimal SMA atau sederajat. Namun, tenaga pelaksana administrasi ini hanya dapat diadakan jika jumlah tenaga pendidik dan kependidikan minimal 50 orang. Berdasarkan Tabel 43 maka dapat dijelaskan bahwa jenjang pendidikan tenaga pelaksana administrasi pada Kemendiknas yakni menunjukkan gejala positif, yang mana kualifikasi pendidikan memenuhi kriteria, dan hanya 4 orang yang berkualifikasi pendidikan SD dan SMP.

Tabel 49. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Pelaksana Administrasi menurut satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	0	0	1	1	5.56
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	SMA	0	0	0	2	3	0	1	6	33.33
4	DIPLOMA	0	0	0	0	1	0	0	1	5.56
5	S1	0	0	0	9	1	0	0	10	55.56
	TOTAL	0	0	0	11	5	0	2	18	100.00
	%	-	-	-	61.11	27.78	-	11.11	100.00	

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 49 maka dapat dijelaskan bahwa jenjang pendidikan tenaga pelaksana administrasi pada Kemenag Kota Banjarmasin yakni menunjukkan gejala positif, yang mana kualifikasi pendidikan memenuhi kriteria, dan hanya 1 orang yang berkualifikasi pendidikan SD. Berdasarkan Permendiknas No. 19 tahun 2005 tentang tenaga pendidik dan kependidikan menyebutkan bahwa kualifikasi tenaga pelaksana administrasi minimal SMA atau sederajat. Namun, tenaga pelaksana administrasi ini hanya dapat diadakan jika jumlah tenaga pendidik dan kependidikan minimal 50 orang. Karena itu, tenaga pelaksana administrasi pada Kemenag telah memenuhi kriteria sehingga memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan bersama.

Tabel 50. Persentase (%) Rasio Jumlah Pelaksana Administrasi dengan Jumlah Satuan Pendidikan

NO	INSTANSI	JUMLAH PELAKSANA ADMINISTRASI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE (%) RASIO
1	KEMDIKNAS	233	630	37
2	KEMENAG	18	132	14
3	TOTAL	351	762	46

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2011 (diolah)

Pada Tabel 50 dapat dibandingkan tentang persentase rasio jumlah pelaksana administrasi antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yakni 37% berbanding 14% dengan total 46%, sehingga masih kekurangan 54% tenaga pelaksana administrasi pada kedua lembaga ini. Untuk mencapai persentase rasio 100% maka diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kemudian direalisasikan sehingga pelayanan pendidikan masyarakat dapat dijalankan secara optimal.

Tenaga kependidikan selanjutnya yaitu gambaran tentang jenjang pendidikan laboran, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 51.
Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Laboran menurut Satuan pendidikan
di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TK	TK S	SDN	SD S	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	JLH	%
1	SD	0	0	2	1	2	2	0	0	0	0	7	15.22
2	SMP	0	0	2	0	2	2	7	1	5	0	19	41.30
3	SMA	0	0	0	1	2	1	3	1	5	0	13	28.26
4	DIPLOMA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.17
5	S1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	6	13.04
	TOTAL	0	0	6	2	6	6	14	2	10	0	46	100.00
	%	-	-	13.04	4.35	13.04	13.04	30.43	4.35	21.74	-	100.00	

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Tenaga laboratorium terdiri dari: Kepala Laboratorium, Teknisi Laboratorium, dan Laboran. Untuk diangkat menjadi tenaga labor, maka seseorang harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai. Kepala labor dari jalur pendidik harus memenuhi syarat: pendidikan S-1, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum, dan memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah. Kepala labor dari jalur tenaga kependidikan harus memenuhi syarat: pendidikan minimal diploma tiga (D3), berpengalaman 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, dan memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah. Teknisi labor memiliki syarat: pendidikan minimal diploma dua (D2) yang relevan dengan peralatan laboratorium dan memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah/madrasah. Sedangkan tenaga laboran harus memenuhi syarat: pendidikan minimal diploma satu (D1) program studi yang relevan dengan jenis laboratorium dan memiliki sertifikat sebagai laboran sekolah/madrasah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan keadaan tenaga laboran (teknisi laboran, tenaga laboran atau guru yang merangkap sebagai laboran) pada Kementerian Pendidikan Nasional, yakni dari total 46 laboran, masih terdapat laboran yang tidak berkualifikasi minimal D1, yaitu 7 jiwa berkualifikasi SD dan 19 jiwa yang berkualifikasi SMP. Data ini sangat dimungkinkan laboran yang dimaksud adalah tenaga laboran bukan teknisi laboran, karena pendidikan Teknisi Laboran hanya ada minimal D1. Dengan demikian, sebanyak 7 jiwa yang memenuhi kualifikasi dari 46 laboran. Hal ini menunjukkan masih kurangnya tenaga laboran pada Satuan Pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan mengupayakan regulasi penambahan tenaga laboran yang berkualifait agar proses belajar mengajar di laboratorium dalam berjalan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan bersama. Gambaran jenjang pendidikan tenaga kependidikan tenaga laboran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Laboran menurut satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	SMA	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	DIPLOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	S1	0	0	1	4	2	0	0	7	100
	TOTAL	0	0	1	4	2	0	0	7	100
	%	-	-	14.29	57.14	28.57	-	-	100.00	

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Pada Tabel 52 tentang tenaga laboran pada satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, tergambar sbb: dari total 7 laboran, semua berkualifikasi S1, dengan demikian sebanyak 7 jiwa memenuhi kualifikasi sebagaimana yang telah diundangkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005.

Tabel 53. Persentase (%) Rasio Jumlah Tenaga Laboran dengan Jumlah Satuan Pendidikan

NO	INSTANSI	JUMLAH PELAKSANA ADMINISTRASI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE (%) RASIO
1	KEMDIKNAS	46	630	7
2	KEMENAG	7	132	5
3	TOTAL	53	762	7

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2011 (diolah)

Pada Tabel 48 dapat dibandingkan tentang persentase rasio jumlah tenaga laboran antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yakni 7% berbanding 5% dengan total 7%, sehingga masih kekurangan 93% tenaga laboran pada kedua lembaga ini. Untuk mencapai persentase rasio 100% maka diperlukan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kemudian direalisasikan sehingga pelayanan pendidikan masyarakat dapat dijalankan secara optimal. Tenaga kependidikan selanjutnya yaitu gambaran tentang jenjang pendidikan tenaga teknis perpustakaan (pustakawan), sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 54. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Teknis Perpustakaan menurut Satuan Pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TK	TK S	SDN	SD S	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	SMA	0	0	8	1	3	3	1	1	3	1	21	43.75
4	DIPLOMA	0	0	4	0	2	1	1	1	0	0	9	18.75
5	S1	0	0	6	1	4	2	1	3	1	0	18	37.50
	TOTAL	0	0	18	2	9	6	3	5	4	1	48	100.00
	%	-	-	37.50	4.17	18.75	12.50	6.25	10.42	8.33	2.08	100.00	

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Dalam Rancangan PP RI tentang Standar Nasional Perpustakaan Tahun 2009 dikatakan bahwa Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya. Sebagaimana bunyi pasal Pasal 25 (1) Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya. (2) Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang.

Pada Tabel 43 tersebut tergambar dari total 48 tenaga teknis perpustakaan terdapat 9 orang yang memenuhi kualifikasi akademik, yaitu D-2. Namun terdapat 18 orang yang berkualifikasi S1. Tenaga teknis perpustakaan apalagi pustakawan adalah hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, mengingat salah satu wadah mengembangkan kreatifitas dan keilmuan adalah perpustakaan. Bisa dibayangkan jika pelayanan pustakanwan dan tenaga teknis tidak optimal atau justru buruk, maka akan berdampak terhadap semangat peserta didik untuk mengakses perpustakaan sebagai sumber ilmu. Karena itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kualifikasi tenaga teknis perpustakaan tersebut agar pelayanan perpustakaan dapat lebih maksimal. Selanjutnya gambaran tentang tenaga teknis perpustakaan (pustakawan) menurut jenjang di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 55. Jenjang Pendidikan Tenaga Teknis Pustakawan menurut Satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	SMA	0	0	1	1	4	0	0	6	35
4	DIPLOMA	0	2	0	0	0	0	0	2	12
5	S1	0	1	1	2	5	0	0	9	53
	TOTAL	0	3	2	3	9	0	0	17	100
	%	-	17.65	11.76	17.65	52.94	-	-	100.00	

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Pada Tabel 55 instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin dari total 17 tenaga teknis perpustakaan hanya 2 (12%) yang memenuhi kualifikasi akademik Diploma. Disamping itu kualifikasi S1 berjumlah 9 (53%) orang, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi syarat. Selanjutnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan SMA yakni 6 jiwa (35%) dimana telah memenuhi kelayakan sebagai tenaga teknis perpustakaan. Secara total tenaga kependidikan pustakawan (tenaga perpustakaan maupun teknis perpustakaan) di

instansi Kementerian Agama belum memenuhi secara kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan di instansi Kementerian Agama.

Kondisi yang telah diuraikan pada tabel di atas mengindikasikan bahwa tenaga perpustakaan (pustakawan maupun teknis) seyogyanya menjadi sasaran dari program strategis dalam rekrutmen tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain itu juga tidak kalah pentingnya pada peningkatan kualitas kualifikasi tenaga perpustakaan di instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Persentase rasio tenaga pustakawan di Kota Banjarmasin tersaji pada tabel berikut.

Tabel 56. Persentase (%) Rasio Jumlah Pustakawan dengan Jumlah Satuan Pendidikan

NO	INSTANSI	JUMLAH PUSTAKAWAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE (%) RASIO
1	KEMDIKNAS	48	630	8
2	KEMENAG	17	132	13
3	TOTAL	65	762	9

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 56 mengenai persentase rasio jumlah pustakawan dengan jumlah satuan pendidikan menunjukkan bahwa di instansi Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan persentase rasio yakni 8% artinya masih terdapat kekurangan tenaga perpustakaan 92% untuk memenuhi alokasi kebutuhan tenaga perpustakaan disetiap satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin. Selanjutnya di instansi Kementerian Agama menunjukkan persentase 13% artinya juga masih terdapat kekurangan 87%. Secara total tenaga kependidikan perpustakaan (pustakawan maupun teknis) masih terdapat kekurangan 91% didasarkan pada rasio saat ini hanya mencapai 9%. Kondisi ini menjelaskan bahwa kurangnya tenaga kependidikan di bidang perpustakaan relatif di penuhi oleh tenaga pendidik (guru) sehingga tenaga pendidik relatif kurang fokus pada profesinya yakni tenaga pendidik dikarenakan mengisi kekosongan pada tenaga perpustakaan. Kondisi tenaga kependidikan pada tenaga kebersihan di Kota Banjarmasin diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 57. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Tenaga Kebersihan menurut satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TK	TK S	SDN	SD S	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	SMA	0	0	8	1	3	3	1	1	3	1	21	43.75
4	DIPLOMA	0	0	4	0	2	1	1	1	0	0	9	18.75
5	S1	0	0	6	1	4	2	1	3	1	0	18	37.50
	TOTAL	0	0	18	2	9	6	3	5	4	1	48	100.00
	%	-	-	37.50	4.17	18.75	12.50	6.25	10.42	8.33	2.08	100.00	

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Pada Tabel 57 instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin dari total 17 tenaga kebersihan yakni 48 jiwa dengan distribusi menurut jenjang pendidikan SMA (21 jiwa, 43,75%), Diploma (9 jiwa atau 18,75%), S1 (18 jiwa atau 37,50%) Total tenaga kependidikan tenaga kebersihan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional belum memenuhi secara kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tenaga kebersihan seyogyanya tidak terlupakan dan menjadi sasaran dari program strategis dalam rekrutmen tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain itu juga tidak kalah pentingnya pada peningkatan kualitas kualifikasi tenaga kebersihan di instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin, sedangkan tenaga kebersihan di instansi Kementerian Agama tersaji pada tabel berikut.

Tabel 58. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Tenaga Kebersihan menurut satuan pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	JLH	%
1	SD	0	0	0	0	4	0	0	4	50
2	SMP	0	0	0	0	1	0	0	1	13
3	SMA	0	0	0	0	1	0	0	1	13
4	DIPLOMA	0	0	0	0	1	0	0	1	13
5	S1	0	0	0	0	1	0	0	1	13
	TOTAL	0	0	0	0	8	0	0	8	100
	%	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00	

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Pada Tabel 58 instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin dari total tenaga kebersihan yakni 8 jiwa dengan distribusi menurut jenjang pendidikan SD (4 jiwa atau 50%), SMP, SMA, Diploma dan S1 masing-masing 1 jiwa atau 13%. Total tenaga kependidikan tenaga kebersihan di instansi Kementerian Agama belum memenuhi secara kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tenaga kebersihan seyogyanya tidak terlupakan dan menjadi sasaran dari program strategis dalam rekrutmen tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama. Persentase rasio tenaga kebersihan pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tersaji pada tabel berikut.

Tabel 59. Persentase (%) Rasio Jumlah Tenaga Kebersihan dengan Jumlah Satuan Pendidikan

NO	INSTANSI	JUMLAH TENAGA KEBERSIHAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE (%) RASIO
1	KEMDIKNAS	49	630	8
2	KEMENAG	8	132	6
3	TOTAL	57	762	8

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 59 mengenai persentase rasio jumlah tenaga kebersihan dengan jumlah satuan pendidikan menunjukkan bahwa di instansi Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan persentase rasio yakni 8% artinya masih terdapat kekurangan tenaga perpustakaan 92% untuk memenuhi alokasi kebutuhan tenaga kebersihan disetiap satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin. Selanjutnya di instansi Kementerian Agama menunjukkan persentase 6% artinya juga masih terdapat kekurangan 94%. Secara total tenaga kependidikan tenaga kebersihan masih terdapat kekurangan 92% didasarkan pada rasio saat ini hanya mencapai 8%. Kondisi ini menjelaskan bahwa kurangnya tenaga kependidikan di bidang kebersihan sekolah relatif sangat kurang dan dikhawatirkan bahwa tenaga pendidik memiliki peran ganda dalam rangka memenuhi tugas-tugas kependidikan yang seyogyanya tugas utamanya adalah tenaga pendidik. Selanjutnya kondisi tenaga kependidikan untuk penjaga sekolah di Kota Banjarmasin khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 60. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Penjaga Sekolah menurut Satuan Pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TK	TK S	SDN	SD S	SMPN	SMPS	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	JLH	%
1	SD	0	0	17	1	4	0	5	0	3	1	13	10.66
2	SMP	0	0	9	5	7	2	2	1	1	0	27	22.13
3	SMA	0	0	37	10	13	2	5	4	4	2	77	63.11
4	DIPLOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	S1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	4.10
	TOTAL	0	0	68	16	24	4	12	5	8	3	122	100.00
	%	-	-	55.74	13.11	19.67	3.28	9.84	4.10	6.56	2.46	100.00	

Sumber : LPMP Kal-Sel, 2011 (diolah)

Pada Tabel 60 instansi Kementerian Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin diketahui bahwa total tenaga penjaga sekolah yakni 122 jiwa dengan distribusi menurut jenjang pendidikan SD (13 jiwa atau 10,66%), SMP (27 jiwa atau 22,13%), SMA (77 jiwa atau 63,11%), dan S1 (5 jiwa atau 4,10%). Total tenaga kependidikan tenaga penjaga sekolah di instansi Kementerian pendidikan Nasional belum memenuhi secara kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan sekolah masih merupakan ancaman yang sangat serius, baik ancaman secara internal maupun eksternal, sehingga proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi jumlah tenaga penjaga sekolah di instansi Kementerian Agama tersaji pada tabel berikut.

Tabel 61. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan Penjaga Sekolah menurut Satuan Pendidikan di Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	RA	MIN	MIS	MTsN	MTsS	MAN	MAS	JLH	%
1	SD	0	0	1	1	2	0	0	4	33.33
2	SMP	0	2	3	1	0	0	0	6	50.00
3	SMA	0	0	1	1	0	0	0	2	16.67
4	DIPLOMA	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	S1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	TOTAL	0	2	5	3	2	0	0	12	100.00
	%	-	16.67	41.67	25.00	16.67	-	-	100.00	

Sumber : Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin, 2011 (diolah)

Pada Tabel 61 instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin dari total tenaga penjaga sekolah yakni 12 jiwa dengan distribusi menurut jenjang pendidikan SD (4 jiwa atau 33,33%), SMP (6 jiwa atau 50%), SMA (2 jiwa atau 16,67%). Total tenaga kependidikan tenaga penjaga sekolah di instansi Kementerian Agama belum memenuhi secara kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan situasi yang sama dengan instansi Kementerian Pendidikan Nasional yakni rendahnya tingkat keamanan sekolah sehingga aspek keamanan merupakan ancaman yang sangat serius, baik ancaman secara internal maupun eksternal, sehingga proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Persentase rasio tenaga penjaga sekolah pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tersaji pada tabel berikut.

Tabel 62. Persentase (%) Rasio Jumlah Penjaga Sekolah dengan Jumlah Satuan Pendidikan

NO	INSTANSI	JUMLAH PENJAGA SEKOLAH	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	PERSENTASE (%) RASIO
1	KEMDIKNAS	122	630	19
2	KEMENAG	12	132	9
3	TOTAL	140	762	18

Sumber : LPMP Kal-Sel dan Dapodik Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2011 (diolah)

Berdasarkan Tabel 62 mengenai persentase rasio jumlah tenaga penjaga sekolah dengan jumlah satuan pendidikan menunjukkan bahwa di instansi Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan persentase rasio yakni 19% artinya masih terdapat kekurangan penjaga sekolah 81% untuk memenuhi alokasi kebutuhan tenaga penjaga sekolah disetiap satuan pendidikan. Selanjutnya di instansi Kementerian Agama menunjukkan persentase 9% artinya juga masih terdapat kekurangan 91%. Secara total tenaga kependidikan penjaga sekolah masih terdapat kekurangan 82% didasarkan pada rasio saat ini hanya mencapai 18%. Kondisi ini menjelaskan bahwa kurangnya tenaga kependidikan di bidang penjaga sekolah relatif sangat kurang dan dikhawatirkan dapat berdampak pada tingginya tingkat kerawanan baik internal maupun eksternal satuan pendidikan. Mengingat fungsi penjaga

sekolah adalah *security* (keamanan) maka alokasi rekrutmen seyogyanya menjadi prioritas agar beberapa kejadian yang sering ditayangkan diberbagai media seperti pencurian, perkelahian dan berbagai aktivitas lainnya di satuan pendidikan dapat berjalan dalam kondisi yang aman dan nyaman.

4.6. Implementasi Kebijakan Hasil Penelitian

Berdasarkan paparan hasil penelitian mengenai kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Banjarmasin, maka dapat diupayakan berbagai bentuk kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan baik pada instansi Kementerian Pendidikan Nasional maupun instansi Kementerian Agama, yang akan diuraikan berikut.

4.6.1. Kebijakan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Pendidikan telah menetapkan visi dan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam sebuah kebijakan yang terarah dalam sebuah Rencana Strategi (Renstra) Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015. Ada tiga kebijakan mendasar bidang pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 yakni ada tiga, (a) pemerataan dan perluasan akses, (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Kaitannya dengan sasaran mutu tenaga pendidik dan kependidikan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin membuat kebijakan sebagai berikut: (a) Peningkatan kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan (b) pengembangan keilmuan, riset dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang ditandai dengan peningkatan daya saing guru dan siswa pada even-even nasional dan internasional.

Upaya konkret dari kebijakan strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan dapat dilaksanakan melalui studi lanjut dengan pendanaan pemerintah, NGO dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal yakni tingkat strata 1 sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang mengamanatkan pendidikan minimum yakni S-1/Diploma IV dari kondisi eksisting 44% yang belum terpenuhi.

- 2) Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banjarmasin dengan menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai agenda pembangunan Kota Banjarmasin 2011-2015 dilaksanakan dengan sasaran peningkatan SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, baik tenaga pendidik dan kependidikan jenjang PAUD, Pendidikan dasar dan Menengah dari kondisi eksisting berkualifikasi S-1 yakni 56,18%, dan selebihnya pada jenjang kualifikasi Diploma 22,17%, SLTA 19,13%, S2 1,31%, SLTP 0,61% dan SD 0,60%.
- 3) Upaya meningkatkan kualifikasi pendidik dapat diupayakan melalui pemberian tugas dan izin belajar kepada para pendidik termasuk bantuan pendidikan (beasiswa).

Strategi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yaitu strategi yang berkaitan dengan tenaga pendidik yakni:

- 1) Melibatkan stakeholder dalam perbaikan mutu sumber daya manusia,
- 2) Mengupayakan pendidikan yang bermutu dengan indikator lulusan pada setiap jenjang sekolah dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, dan bagi lulusan yang tidak melanjutkan lagi dapat masuk ke pasar kerja,
- 3) Melaksanakan analisis terhadap hasil uji coba untuk ditindaklanjuti,
- 4) Peningkatan kompetensi guru melalui pembinaan teknis pendidikan pada semua jenjang pendidikan, dan
- 5) Peningkatan kualifikasi guru SD dari D2 ke S1.

Sasaran strategi mutu tenaga pendidik dan kependidikan Kota Banjarmasin yakni dengan peningkatan kualifikasi guru baik pada tingkat TK sampai SLTA melalui aktivitas kegiatan program sebagai berikut:

- 1) Tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) dapat diupayakan melalui studi lanjut dengan beasiswa dengan sumber pendanaan multi arah.
- 2) Tenaga pendidik yang belum memiliki akta mengajar (68%) dapat diupayakan melalui Pendidikan latihan dan Profesi Guru (PLPG) di LPTK.
- 3) Tenaga pendidik yang tidak sesuai mengajar (37%) dapat diupayakan melalui kegiatan DIKLAT, seminar, lokakarya, pengaktifan Kelompok Kerja Guru (KKG), Muasyarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

- 4) Tenaga pendidik yang memiliki latar belakang non pendidikan 13%, dapat diupayakan melalui pengaktifan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG), DIKLAT, seminar, dan lokakarya.
- 5) Percepatan kepangkatan tenaga pendidik melalui kegiatan DIKLAT dan pengadaan jurnal ilmiah.

Strategi yang berkaitan dengan Tenaga Kependidikan yakni sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan khusus terutama kepada sekolah yang akan diakreditasi agar dapat menyiapkan bahan yang diperlukan sesuai dengan instrumen evaluasi diri,
- 2) Peningkatan wawasan manajemen pendidikan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepada semua warga sekolah, peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan dan stakeholder lainnya,
- 3) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
- 4) Melakukan supervisi silang kepala sekolah, antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, sehingga tercipta suasana dan penyegaran baik terhadap guru yang di supervisi maupun kepala sekolah yang melakukan supervisi.

Sasaran strategis mutu tenaga kependidikan dapat diupayakan melalui aktivitas sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kepala sekolah yang non S1 dari kondisi eksisting 37% serta peningkatan kualifikasi S1 (58,21%) dan kualifikasi S2 (4,78%) untuk memenuhi standar nasional mengenai tenaga pendidik dan kependidikan Nomor 16 Tahun 2007.
- 2) Peningkatan jumlah tenaga kependidikan non kepala sekolah seperti tenaga administrasi, tenaga laboran, pustakawan, penjaga sekolah dan tenaga kebersihan melalui rekrutmen formasi dari kondisi eksisting rasio tenaga kependidikan dengan satuan pendidikan yakni 1:2.
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas (kualifikasi pendidikan) tenaga laboran dari persentase rasio 7%, .dapat diupayakan melalui rekrutmen tenaga kependidikan.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas (kualifikasi pendidikan) tenaga teknis perpustakaan (8%), dapat diupayakan melalui rekrutmen tenaga kependidikan.

- 5) Peningkatan kualitas penjaga sekolah dari kondisi eksisting persentase rasio 19% dapat diupayakan melalui rekrutmen pegawai pada formasi tenaga kependidikan.
- 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas (kualifikasi pendidikan) tenaga kebersihan dari persentase rasio saat ini 8%, dapat diupayakan melalui rekrutmen tenaga kependidikan.
- 7) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penjaga sekolah dari persentase rasio saat ini 19%, dapat diupayakan melalui rekrutmen tenaga pegawai sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 8) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dapat diupayakan melalui DIKLAT, Magang dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional.
- 9) Percepatan keangkatan tenaga kependidikan khususnya kepala sekolah melalui kegiatan DIKLAT dan pengadaan jurnal ilmiah.

4.6.2. Kebijakan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Upaya Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas mutu madrasah dan pendidikan agama sekolah umum sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Banjarmasin 2010-2014, khususnya dalam peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan diuraikan sebagai berikut:

Tujuan: Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik (guru) sejak jenjang satuan pendidikan dasar (RA, MI) sampai menengah (MTs, MA).

Sasaran: Tercapainya kualitas mutu madrasah dan pendidikan agama pada sekolah umum

Kebijakan: Menyiapkan tersedianya siswa madrasah yang berkualitas dan guru pendidikan yang profesional

Program: Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan aktivitas:

Tenaga Pendidik:

- 1) Peningkatan jumlah kualifikasi tenaga pendidik dengan jenjang pendidikan minimum S1 dari kondisi eksisting 85% atau 15% tenaga pendidik/guru yang belum berkualifikasi S1 dapat diupayakan melalui studi lanjut.
- 2) Peningkatan jumlah tenaga pendidik yang belum memiliki AKTA mengajar dari kondisi eksisting, dapat diupayakan melalui Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG).

- 3) Peningkatan jumlah kualifikasi tenaga pendidik yang tidak sesuai mengajar dengan mata pelajaran dari kondisi eksisting ... % dapat diupayakan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), seminar dan lokakarya, dan DIKLAT guru mata pelajaran.
- 4) Peningkatan kuantitas tenaga pendidik dari kondisi eksisting rasio..., dapat diupayakan melalui rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 5) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dapat diupayakan melalui kegiatan DIKLAT, magang dalam rangka menuju peningkatan kompetensi profesional.

Tenaga Kependidikan:

- 6) Peningkatan kuantitas tenaga kependidikan dari kondisi eksisting rasio 1:3 dapat diupayakan melalui rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 7) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai arah peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, dapat diupayakan melalui kegiatan studi lanjut.
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga laboran dari kondisi existing persentase rasio 5%, dapat diupayakan melalui rekrutmen pegawai baru dan studi lanjut atau DIKLAT.
- 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga teknis perpustakaan dari perentase rasio 5% melalui rekrutmen pegawai baru dan studi lanjut atau DIKLAT.
- 10) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kebersihan dari persentase rasio 6%, dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru yang kualifikasi pendidikan sesuai yang telah dipersyaratkan.
- 11) Peningkatan kuantitas dan kualitas penjaga sekolah dari persentase rasio 9% dapat dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru yang kualifikasi pendidikan sesuai yang telah dipersyaratkan.
- 12) Percepatan kepangkatan tenaga kependidikan khususnya kepala sekolah dari dapat dilakukan melalui DIKLAT dan pengadaan jurnal ilmiah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka telah diperoleh kualifikasi pendidik di Kota Banjarmasin pada semua jenjang pendidikan (PAUD, Pendidikan dasar dan Menengah) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi jenjang pendidikan tenaga pendidik di Kota Banjarmasin yang berkualifikasi S-1 (56,18%), S2 (1,31%), Diploma (22,17%), SLTA (19,13%), SLTP (0,61%) dan SD (0,60%).
- 2) Kualifikasi jenjang pendidikan tenaga pendidik yang memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 yakni (57,59%) atau (43,41%) tidak memenuhi kriteria.
- 3) Kesesuaian mengajar guru (pendidik) di instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang sesuai yakni 63% dan tidak sesuai mengajar 37% dengan total populasi tenaga pendidik 9008 jiwa di instansi Kementerian Pendidikan Nasional dan 796 jiwa pada instansi Kementerian Agama.
- 4) Rasio tenaga kependidikan dengan jumlah sekolah pada satuan pendidikan negeri yakni 1:3 dan swasta dengan rasio 1:2.
- 5) Kualifikasi tenaga kependidikan Kepala Sekolah dengan kualifikasi S1 dan S2 yakni 64% dan non S1 yakni 36%.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilaksanakan melalui pemetaan kebutuhan pada masing-masing satuan pendidikan.
- 2) Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan dapat ditempuh melalui kegiatan studi lanjut, dengan pembiayaan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memenuhi kriteria Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Pendidik dan Kependidikan.
- 3) Ketidaksesuaian tenaga pendidik dalam mengajar dapat ditanggulangi melalui kegiatan DIKLAT, seminar, lokakarya serta pengaktifan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kompetensi profesional guru.
- 4) Rendahnya rasio tenaga kependidikan dengan jumlah satuan pendidikan dapat diupayakan melalui rekrutmen tenaga kependidikan dengan mendasarkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
- 5) Peningkatan mutu dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilaksanakan melalui pendanaan APBN, APBD, CSR, dan sumber NGO lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 2007. *Pemetaan anak tidak dan putus sekolah usia 7-15 tahun di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NTB: Ke arah Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun*. Mataram: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.
- Badan Pusat Statistik (BPS).2 010. Kota Banjarmasin dalam Angka. Banjarmasin: BPS
- Bedjo, Nasruddin, Syaharuddin, *Pemetaan Sarana dan Prasarana: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2010.
- Burhanuddin, 1994, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2007. *Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- E.Mulyasa, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Erlis Karnesih, 2005, *Pengentasan Penduduk Miskin sebagai Refleksi Otonomi Daerah Di Jawa Bara*. *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 7, Tahun 2005.
- Evaluasi Persebaran Sarana Pendidikan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas Sekolah*. www.theplanner.wordpress.com, diakses tanggal 20 Maret 2009.
- Laporan Pelaksanaan Pemetaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kota Banjarbaru*. 2008. Banjarbaru: Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- Mantra, Bagoes, Ida. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasruddin. 2010. *Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2010.
- NN, 2008, *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Asa Mandiri.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. <http://www.tanahlautkab.go.id> , *Pendidikan*. diakses pada Tanggal 26 Juni 2009.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Visi dan Misi Pembangunan Daerah*. <http://www.kalselprov.go.id>, diakses pada Tanggal 26 Juni 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007. *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- “Profil dan Potensi Wilayah Kota Banjarmasin”, <http://eissartika.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2011.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 2008. *Daftar Desa Tertinggal yang Terdapat dalam PNPM Perdesaan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Sugeng Andono, 2008. *Relevansi antara Hasil Pemetaan Sekolah dengan Perencanaan Pengembangan Pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul*, Tesis, Yogyakarta: UGM.